

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PERTAMBANGAN TANPA
IZIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG
MINYAK DAN GAS BUMI**

**(Studi Kasus di Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten
Bojonegoro)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

M. Ainun Bahroni

NIM. 175010100111143



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2021



HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku
Pertambangan Tanpa Izin Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan
Gas Bumi (Studi Kasus di Desa Wonocolo,
Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro)

Identitas Penulis :

a. Nama : M. Ainun Bahroni
b. NIM : 175010100111143
c. Konsentrasi : Kepidanaan

Jangka Waktu Penelitian :

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama



Prof. Dr, I Nyoman Nurjaya , S.H, M.S

NIP. 195409251980031002

Pembimbing Pendamping



Dr. Yuliati, S.H, LL.M

NIP. 196607101992032003

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Hukum



Dr. Sukarmi, S.H, M.Hum

NIP. 196705031991032000

HALAMAN PENGESAHAN

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pertambangan Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Studi Kasus di Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro)

Oleh :

M. Ainun Bahroni

NIM. 175010100111143

Skripsi ini telah disahkan pada tanggal (08 Juli 2021) oleh

Pembimbing Utama



Prof. Dr, I Nyoman Nurjaya , S.H, M.S

NIP. 195409251980031002

Pembimbing Pendamping



Dr. Yulianti, S.H, LL.M

NIP. 196607101992032003

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Hukum



Dr. Sukarmi, S.H, M.Hum

NIP. 196705031991032000

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muchamad Ali Safa'at, SH., MH.

NIP. 197608151999031003

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadiray Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. M. Ali Safa'at, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Eny Harjati, S.H., M.H., selaku Ketua Departemen Bagian Hukum Pidana
3. Bapak Prof. Dr, I Nyoman Nurjaya , S.H, M.S, selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan dan kesabarannya.
4. Ibu Dr. Yuliati, S.H, LL.M, selaku Dosen Pendamping Kedua, atas bimbingan, kesabaran, dan motivasinya.
5. Seluruh jajaran Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
6. Kedua Orang Tua penulis, Bapak Dasnan dan Ibu Asmiyatin atas segala doa, dukungan dan materi yang tiada henti dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Para penambang minyak tradisional, Bapak Ratib, dan para perangkat desa Wonocolo, yang telah memberi informasi, bertukar pikiran dan ilmu selama masa penelitian.
8. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum Universitas Brawijaya atas segala kesempatan untuk dapat berkembang dan belajar banyak hal tentang organisasi.
9. Kawan – Kawan LYMI atas segala perjuangan dan kesempatan untuk menimba ilmu sebesar-besarnya.
10. Sahabat-sahabat saya dari perkumpulan HMK, atas segala waktu, dukungan, dan kebersamaan selama menjalani masa-masa kuliah.
11. Serta pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.



Malang, April 2021

M. Ainun Bahroni

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
Dr. Muchamad Ali Safa'at, SH., MH.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
JADWAL PELAKSANAAN PENELITIAN.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
RINGKASAN.....	xii
SUMMARY.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
a) Latar Belakang.....	1
b) Orisinalitas.....	5
c) Rumusan Masalah.....	9
d) Tujuan Penelitian.....	9
e) Manfaat Penelitian.....	10
1. Manfaat Teoritis.....	10
2. Manfaat Praktis.....	10
f) Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Pendekatan Penelitian.....	11
3. Lokasi Penelitian.....	12

4. Jenis dan Sumber Data.....	12
5. Teknik Memperoleh Data.....	15
5. Populasi dan Sampel dan Teknik Sampling	16
6. Teknis Analisa Data	19
7. Definisi Operasional.....	20
BAB II.....	22
TINJAUAN PUSTAKA.....	22
1. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	22
1.1 Pengertian Tindak Pidana	22
1.2 Unsur-unsur Tindak Pidana	23
1.3 Unsur Tindak Pidana Secara Teoritis	24
1.4 Jenis-jenis Tindak Pidana	25
2. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	27
2.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	27
2.2 Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana	29
2.3 Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	30
3. Tinjauan Umum tentang Pertambangan Ilegal (Tanpa izin).....	41
3.1 Pengertian Pertambangan	41
3.2 Pengertian Pertambangan Tanpa izin.....	42
3.3 Pertambangan Tanpa izin Menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan gas Bumi	44
4. Tinjauan Umum tentang Minyak bumi.....	46
4.1 Pengertian Minyak bumi	46
4.2 Tujuan Pengelolaan Gas Bumi	48
BAB III.....	50
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	50

a) Gambaran Umum Lokasi Penelitian	50
1. Deskripsi Umum Kabupaten Bojonegoro	50
2. Deskripsi Umum Wilayah Wonocolo	51
b) Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pertambangan Ilegal di Wonocolo	55
1. Kondisi Geografis yang tidak mendukung	55
2. Murahnya Harga minyak dari KUD dan PT BBS	58
3. Kondisi Ekonomi	61
c) Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Ilegal di Wonocolo	64
1. Unsur Pertanggungjawaban Pidana Adanya Pelaku tindak pidana (baik orang maupun badan hukum)	76
2. Unsur Pertanggungjawaban Pidana Adanya perbuatan (baik aktif maupun pasif)	82
3. Unsur Pertanggungjawaban Pidana Adanya kesalahan (baik sengaja maupun culpa)	84
4. Unsur Pertanggungjawaban Pidana Mampu bertanggung jawab (tidak ada alasan pemaaf dan tidak ada alasan pembenar)	88
5. Unsur Pertanggungjawaban Pidana Bersifat melawan hukum (sesuai dengan azas legalitas)	94
BAB IV	99
KESIMPULAN DAN SARAN	99
1. Kesimpulan	99
2. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	102

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Penetapan Pembimbing Skripsi.....	109
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian.....	112
Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian.....	114
Lampiran 4 Pedoman Wawancara.....	115
Lampiran 5 Hasil Olah Data Kuisiонер.....	116



JADWAL PELAKSANAAN PENELITIAN

No.	Kegiatan	Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6
1	Persiapan	X					
2	Melakukan Pra Survey		X				
3	Melakukan study Pustaka			X			
4	Melaksanakan Penelitian Lapangan				X		
5	Menganalisis Data					X	
6	Menulis Laporan Skripsi						X

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian.....	6
Tabel 2. Batas Wilayah kabupaten Bojonegoro.....	49
Tabel 3. Batas Wilayah Desa Wonocolo.....	50
Tabel 4. Jumlah Penduduk Kerja (10 Tahun keatas) menurut Jenis Usaha ditiap Desa.....	60



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Sumur minyak Wonocolo Jaman Belanda.....	52
Gambar 2. Kondisi Bentang Alam di Wonocolo.....	53
Gambar 3. Salah satu Sumur Galian Baru di Wonocolo.....	90
Gambar 4. Pengangkutan Minyak secara manual menggunakan sepeda motor..	93
Gambar 5. Jerigen Penyimpanan sementara sebelum di setor ke pengecer dan pengepul.....	95
Gambar 6. Proses Pengeboran menggunakan mesin tradisional.....	97



RINGKASAN

M. Ainun Bahroni, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, April 2021, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PERTAMBANGAN TANPA IZIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI (Studi Kasus di Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro), Prof. Dr, I Nyoman Nurjaya, S.H, M.S, Dr. Yuliati, S.H, LL.M.

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pertambangan Ilegal di Wonocolo. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan. Dari permasalahan tersebut, penulis kemudian melakukan studi di Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro dimana terdapat pertambangan minyak Tradisional untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penambangan tanpa izin. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu: (1) Apa Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pertambangan Ilegal di Wonocolo?. (2) Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Ilegal di Wonocolo?

Metode penelitian dalam skripsi ini yaitu yuridis empiris yang mengungkap atau mengkaji hukum dalam kenyataan dengan memperoleh data melalui wawancara dan observasi secara langsung. Wawancara dilakukan dengan Pelaku pertambangan Ilegal di Wonocolo, Perangkat Desa Wonocolo, dan Penanggung Jawab Museum di Wonocolo, yang kemudia diambil menggunakan teknik *purposive sampling* dan *Snow-ball sampling*.

Factor penyebab yang melatarbelakangi para pelaku untuk melakukan Tindak Pidana penambangan ilegal di wonocolo, meliputi kondisi Geografis, Murahnya harga minyak di KUD dan PT BBS, kondisi ekonomi, dan konflik yang tidak berkesudahan. Dimana factor tersebutlah yang menjadi hal yang penulis kaji dari segi pertanggungjawaban pidananya. Dari segi pertanggungjawaban pidana, penulis menggunakan teori dualistic dimana ada pemisahan antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidananya. Dimana penulis menyimpulkan bahwa

pelaku pertambangan ilegal di Wonocolo dapat dijatuhi tindak pidana jika memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana, meliputi . Ada pelaku tindak pidana (baik orang maupun badan hukum), Ada perbuatan (baik aktif maupun pasif), Ada kesalahan (baik sengaja maupun culpa), Mampu bertanggung jawab (tidak ada alasan pemaaf dan tidak ada alasan pembenar), Bersifat melawan hukum (sesuai dengan azas legalitas). Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, melakukan sosialisasi peraturan perundangan yang terkait dengan kegiatan penambangan. Adapun saran pada penelitian ini meliputi pengoptimalan kembali peran KUD dan BUMD sesuai peraturan yang berlaku (Peraturan Menteri ESDM No. 01 Tahun 2008 Pasal 2 ayat 3), Penegakkan hukum khususnya untuk mengatasi penyulingan ilegal, angkutan minyak mentah ke luar desa, dan penjualan minyak mentah kepada pengecer maupun pengepul.



SUMMARY

M. Ainun Bahroni, Criminal Law, Faculty of Law, University of Brawijaya, April 2021, CRIMINAL RESPONSIBILITY OF UNLICENSED MINING ACTORS BASED ON LAW NUMBER 22 OF 2001 CONCERNING OIL AND GAS (Case Study in Wonocolo Village, Kedewan District, Bojonegoro Regency), Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH, MS, Dr. Yuliati, SH, LL.M.

In this thesis, the author raises the issue of Criminal Liability for Illegal Mining Actors in Wonocolo. Where in research the use of the theory of Criminal Liability for Illegal Mining Actors in Wonocolo is something that really needs to be studied. Because the concept of criminal responsibility is actually not only a matter of law itself but also a matter of moral values or general morals adhered to by a society or groups in society, this is done so that criminal responsibility is carried out by fulfilling justice. From these problems, the author then conducted a study in Wonocolo Village, Kedewan District, Bojonegoro Regency where there is traditional oil mining to find out how accountable the mining actors without a permit. Based on this, the problem formulations in this thesis are: (1) Causes of the Perpetrators of Committing Illegal Mining Crimes in Wonocolo? (2) What is the Criminal Accountability of Perpetrators of Illegal Mining Crimes in Wonocolo?

The research method in this thesis is juridical empirical which reveals or examines the law in research by obtaining data through interviews and direct observation. Interviews were conducted with illegal mining actors in Wonocolo, Wonocolo Village officials, and the person in charge of the Museum in Wonocolo, which were then taken using purposive sampling and snow-ball sampling techniques.

From the results of interviews conducted by the author, there are several factors that motivate the perpetrators to commit illegal mining crimes in Wonocolo, including geographic conditions, cheap oil prices in KUD and PT BBS, economic conditions, and endless conflicts. Where these factors are what the authors examine in terms of criminal liability. In terms of criminal liability, the author uses

a dualistic theory where there is a separation between criminal acts and criminal liability. Where the authors concluded that illegal mining actors in Wonocolo could be subject to criminal acts if they handled irresponsible cases, including. There is a criminal act (either a person or a legal entity), There is an act (both active and passive), There is an error (either intentionally or culpa), Able to take responsibility (no excuse for forgiveness and no justification), It is against the law (in accordance with legality principle).



BAB I

PENDAHULUAN

a) Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam yang belum sepenuhnya dieksplorasi dan dieksploitasi serta belum diatur secara efisien dan efektif. Terhadap kekayaan sumber daya alam tersebut, negara mengatur secara tegas yang dimuat di dalam konstitusi Indonesia. Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 Ayat (3) menegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, hal ini menunjukkan akan adanya hak penguasaan negara terhadap bumi, air dan kekayaan alam berlandaskan kemakmuran rakyat.¹ Dan adanya Penegakan Hukum sebagai salah satu alat untuk meraih keadilan, diharapkan oleh sekelompok manusia untuk bisa memberikan rasa keadilan bagi seluruh anggotanya. Hal ini dikarenakan manusia yang berkelompok pastilah memiliki tujuan bersama dan agar tidak selalu terjadi benturan kepentingan maka diperlukan norma yang salah satunya adalah hukum untuk mengatur komunitasnya.²

Pada tahun 2001, pemerintah menyusun pengaturan minyak dan gas bumi, dengan membentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dimana adanya pengaturan ini diharapkan dapat menjadi landasan terhadap seluruh kegiatan eksplorasi dan eksploitasi Minyak dan Gas Bumi baik dari segi pengaturan, penegakan hukum, maupun sanksi bagi pelaku yang tidak mematuhi peraturan tersebut. Menurut Undang-undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Menteri ESDM tahun 2008, minyak

¹ Nandang Sudrajat. Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia. Pustaka Yustisia. Yogyakarta. 2013. Hlm

² Pengantar Ilmu Hukum, Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, Jakarta: Rajawali Pers, 2016 hlm. 5.

dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis yang tidak dapat diperbarui, dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional. Pengelolaannya harus secara maksimal dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Peranan minyak bagi perekonomian Indonesia merupakan faktor yang sangat menentukan, baik sebagai sumber penerimaan negara, sumber cadangan devisa, alat, atau sarana stabilisasi ekonomi. Adanya penambangan minyak tradisional di Indonesia sudah menjadi pengetahuan umum bagi masyarakat luas³. Akan tetapi banyak sekali penambangan minyak tradisional dilakukan secara ilegal terhadap pengeboran sumur baru yang tanpa memperhatikan Analisis Dampak Lingkungan. Salah satunya adalah penambangan minyak tradisional di Desa Wonocolo.

Desa Wonocolo Kecamatan Kedewan kabupaten Bojonegoro. Desa yang bertempat di sisi Utara Bojonegoro terletak di dataran yang tinggi atau dipegunungan yang memiliki luas 140.002 Ha atau 11,37km², berjarak 5 km dari Kecamatan Kedewan dan 58km dari Kota Bojonegoro, dan memiliki sawah 5 hektare dan tanah yang kering sekitar 1.113Ha. Tanah sawah yang tidak luas mengakibatkan Masyarakat tidak memiliki pekerjaan sampingan selain menjadi Penambang minyak tradisional.

Pada tahun 1894 seorang penambang konsesi minyak dari Hindia Belanda bernama Adiraan Stoop untuk pertama kalinya melakukan eksplorasi minyak bumi di kawasan Bojonegoro, Jawa Timur, dan mendirikan perusahaan Dordtsche Petroleum Maatschappij. Setelah lebih dari satu abad sumur-sumur minyak tersebut dieksploitasi. Setelah Belanda kalah perang dan sebelum meninggalkan Indonesia, Belanda menimbun sumur-sumur minyak itu dengan tanah karena Belanda tidak ingin bangsa Indonesia menggunakan dan menikmati hasil minyak

³ Made Pertiwi. "Tambang Minyak Tradisional Wonocolo." Kompas Travel, Januari 4, 2015, diakses pada 10 Oktober 2020, <http://travel.kompas/read/2015/01/04/170300427.html>

dari sumur-sumur itu. Akhirnya dengan bebekal peta lama yang memuat denah dengan lokasi titik-titik sumur minyak, warga dengan bekerja secara berkelompok dan bersama-sama kemudian mencari, menggali, dan menambang sumur minyak itu, banyak di antara sumur-sumur minyak tersebut yang dinyatakan telah habis. Namun kenyataannya tidak semua sumur peninggalan Belanda tersebut telah habis. Puluhan titik sumur di Desa Wonocolo Kecamatan Kadewan Kabupaten Bojonegoro ternyata masih aktif yang menandakan cadangan minyak di kawasan tersebut masih berlimpah. Sejak tahun 1945 cadangan minyak di Desa Wonocolo dikelola oleh Pemerintah Indonesia dengan menggunakan pompa sumur atau pompa anggur elektrik. Tetapi sebagian masih dikelola warga setempat secara tradisional dan telah dilakukan secara turun temurun. Penambangan minyak pada sumur-sumur tua di Desa Wonocolo sudah menjadi sumber pencaharian warga yang dikelola oleh kelompok penambang dimana setiap kelompok terdiri dari 10-15 orang. Selain menambang Minyak Mereka juga mencampurkannya dengan memakai air. Hasil penjualan tersebut dibagi rata oleh ketua kelompok pada akhir pekan, eksplorasi tersebut dikerjakan lantaran mampu menyerap tenaga kerja cukup banyak. Selain itu, bila menggunakan motor penggerak, biaya yang dibutuhkannya tak seimbang dengan hasil yang diperoleh. Kenaikan harga minyak dunia tidak mempengaruhi harga minyak mentah dari masyarakat Wonocolo ini, meski harga bahan bakar minyak terus naik. Namun, para penambang tradisional ini masih hidup pas-pasan. Apalagi, minyak mentah yang mereka hasilkan harganya ditentukan dari pengepul yang kemudian menjualnya ke Pertamina. Minyak mentah yang dieksplorasi kelompok penambang disetorkan ke KUD Sumber Pangan dan PT BBS, dan selanjutnya KUD Sumber Pangan dan PT BBS menyetorkan ke PT. Pertamina EP. Cepu untuk diolah lebih lanjut. Dalam hubungan kerja ini kelompok penambang mendapat biaya ongkos angkut dari KUD Sumber Pangan dan PT BBS. Sejak tahun 2005 kondisi mulai berubah karena masuknya orang-orang dari luar Desa Wonocolo yang membeli minyak mentah dari kelompok penambang dan kemudian mengolahnya sendiri dengan melakukan penyulingan untuk memperoleh hasil produk berupa solar. Dengan demikian di

Desa Wonocolo terdapat kelompok penambang, penambang sekaligus juga penyuling dan kelompok penyuling. Akibat kehadiran orang-orang luar tersebut, kelompok penambang tidak lagi menyeter minyak mentah ke KUD Sumber Pangan dan PT BBS, dengan alasan harga yang diberikan oleh orang luar lebih tinggi. Akhirnya menjadi tidak berperan dan sejak Nopember 2006 tidak ada lagi minyak mentah yang disetorkan ke PT. Pertamina EP. Cepu. Desa Wonocolo sebagai salah satu daerah yang kaya minyak bumi, seharusnya memiliki masyarakat yang lebih sejahtera karena perekonomiannya ditopang dari hasil pengolahan minyak bumi, akan tetapi kenyataannya masyarakat tersebut tidak dapat menikmati kekayaan alam yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Dan tidak tersedianya lahan subur yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian dan tingkat pendidikan serta keterampilan yang rendah membuat mereka tetap pada kondisi ekonomi yang dapat dikatakan di bawah garis kemiskinan. Inilah yang menyebabkan mayoritas masyarakat Wonocolo memiliki ketergantungan ekonomi terhadap penambangan minyak yang mereka lakukan.

Melihat dari segi penegakan hukum pidana kegiatan penambangan minyak yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Wonocolo termasuk dalam Tindak Pidana, Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum). Hal itu dikarenakan sebagian hasil penambangan yang dilakukan diperjualbelikan secara bebas, tidak sesuai dengan apa yang sudah disepakati dengan lembaga legal dari pihak PERTAMINA dan kegiatan Penambangan di Wonocolo mayoritas tidak memiliki ijin atau ilegal. Mayoritas sumur galian baru yang tidak memiliki ijin disebabkan karena para penambang tidak memenuhi syarat untuk mengurus perizinan. Secara Umum pertambangan ilegal adalah kegiatan penambangan atau penggalian Sumber Daya Alam (SDA) yang dilakukan oleh perusahaan yang tidak memiliki izin, prosedur benar atau sering disebut sebagai Good Mining Practice. Terdapat 3 sisi dampak yang

diakibatkan oleh pertambangan ilegal, yaitu sisi ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Secara khusus Pertambangan Ilegal yang dilakukan Penambang di Wonocolo ini melanggar ketentuan pasal 52 dan 53 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001

Tentang Minyak dan Gas Bumi, dimana pasal tersebut termasuk dalam BAB XI mengenai ketentuan Pidana dan dikategorikan sebagai Tindak kejahatan.

Pertanggungjawaban Pidana Dalam bahasa inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai responsibility, atau criminal liability.

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.⁴

Peneliti tertarik membahas judul tersebut dikarenakan ingin mengetahui bagaimana Proses Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pertambangan Ilegal di Wonocolo, dan apa yang menjadi latar belakang bagi para Pelaku untuk melakukan Tindak Pidana tersebut. Dimana Peneliti sangat tertarik dengan Penegkan Hukum dan Penyelesaian sengketa antara para pihak di Wonocolo. Oleh karena itu perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai kemampuan bertanggungjawab dari pelaku Pertambangan Ilegal dari segi penegakan Hukum Pidana.

b) Orisinalitas

Table 1

⁴ Hanafi, Mahrus, Sistem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm-16

Orisinalitas

No.	Nama Peneliti dan Asal instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Elha Ayu Alinda Siddiqoh (07114005) UNIVERSITAS AIRLANGGA	Konflik Masyarakat Penambang Minyak Mentah (Analisis Konflik Pengelolaan Pertambangan Minyak Mentah Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro Periode 2009 - 2015)	1. Bagaimana pemetaan konflik yang terjadi pada masyarakat penambang minyak mentah di Desa Wonocolo, kecamatan Kedewan, kabupaten Bojonegoro? 2. bagaimana dinamika konflik yang berkembang di masyarakat penambang minyak mentah dalam kurun waktu tahun 2009-2015 di Desa Wonocolo, kecamatan Kedewan, kabupaten Bojonegoro? 3. bagaimana tat Kelola konflik masyarakat penambang minyak mentah Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, kabupaten Bojonegoro
2.	Hesty Aprilya	Analisis Penerapan Sanksi Pidana	1. Apa yang menjadi dasar Pertimbangan

	<p>(02011381419330)</p> <p>UNIVERSITAS SRIWIJAYA</p>	<p>Terhadap Pelaku Pengangkutan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi Tanpa Izin Usaha Pengangkutan (Studi Putusan Nomor 53/Pid.sus/2015/PN Mtw (Migas) dan Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2017/PN Plk)</p>	<p>Hakim terhadap Pelaku Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi tanpa Izin Usaha Pengangkutan Studi Putusan Nomor 53/Pid.sus/2015/PN Mtw (Migas) dan Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2017/PN Plk ? 2. Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Pelaku Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi tanpa Izin Usaha Pengangkutan Studi Putusan Nomor 53/Pid.sus/2015/PN Mtw (Migas) dan Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2017/PN Plk ditinjau dari tujuan pemidanaan ?</p>
3.	<p>Marjan Setiawan 3450407049</p> <p>UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG</p>	<p>PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI MINYAK DAN GAS BUMI (Studi Pada</p>	<p>1) Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana Eksplorasi</p>

		Pengadilan Negeri Blora)	atau Eksploitasi Minyak dan Gas tanpa mempunyai kontrak kerja atau surat ijin usaha ?
			2) Bagaimana hambatan yang dihadapi Hakim Pengadilan Negeri Blora Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku tindak pidana Eksplorasi atau Eksploitasi Minyak dan Gas tanpa mempunyai kontrak kerja atau surat ijin usaha ?
			3) Bagaimana upaya aparatus penegak hukum di Pengadilan Negeri Blora dalam menangani hambatan-hambatan dalam penegakan hukum pidana Eksplorasi atau Eksploitasi Minyak dan Gas tanpa mempunyai kontrak kerja atau surat ijin usaha ?

Perbedaan :

1. Perbedaan dengan Penelitian Yang pertama adalah, perbedaan mendasar mengenai focus penelitian, dimana pada penelitian yang pertama ditinjau dari segi sosiologi dan tata pengelolaan Konflik, sedangkan pada penelitian ini ditinjau dari segi hukum khususnya segi Hukum Pidananya.

2. Perbedaan dengan penelitian yang kedua adalah penelitian kedua adalah perbedaan mendasar mengenai fokus penelitian, dimana pada penelitian kedua menitik beratkan kepada dasar pertimbangan putusan dan penerapan sanksi pidana, sedangkan pada penelitian ini menitikberatkan kepada peranggungan pidana dan apakah terpenuhi unsur kesalahan pada proses kemampuan bertanggungjawab dari pelaku tindak pidana pertambangan ilegal.

3. Perbedaan dengan penelitian ketiga adalah, penelitian ketiga menitikberatkan dari segi fokus penelitian, dimana pada penelitian ketiga ini menitikberatkan pada pertimbangan, hambatan, dan upaya hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku penambang ilegal.

c) Rumusan Masalah

1. Apa Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pertambangan Ilegal di Wonocolo?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Ilegal di Wonocolo?

d) Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Apa Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pertambangan Ilegal di Wonocolo

2. Mengetahui Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Ilegal di Wonocolo.

e) Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan atau referensi bagi perkembangan pengetahuan di bidang ilmu hukum dan menambah kajian ilmu hukum pidana khususnya Mengetahui ..

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penegak Hukum

Agar pihak terkait dalam penegakan hukum penambangan ilegal dapat mengetahui bahwa penegakan hukum tidak dilihat dari segi normatif tetapi perlu dilihat dari segi empiris agar tercapainya keadilan.

b. Bagi Masyarakat

Agar masyarakat dapat mengetahui bahwa yang mereka lakukan terhadap penambangan ilegal memang salah secara hukum, akan tetapi perlu adanya peran lebih bagi para pihak terkait untuk menyelesaikan masalah tersebut.

c. Bagi Penulis

Sebagai wacana memperdalam pengetahuan pada bidang ilmu hukum pidana, khususnya tindak pidana Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambangan Ilegal di Wonocolo, dan sebagai bahan praktikum secara langsung dan autentik terhadap realitas proses implementasi hukum yang terjadi di masyarakat.

f) Metode Penelitian

Metode penelitian dilakukan dalam usaha untuk memperoleh data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang di dasarkan kepada metode sistematis, dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul⁵

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan bentuk yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara studi lapangan. Penelitian hukum empiris tidak hanya memandang hukum sebagai disiplin yang preskriptif dan terapan belaka, melainkan juga kenyataan hukum. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan mengkaji mengenai factor penyebab pelaku pertambangan melakukan Tindak Pidana penambangan ilegal dan pertanggungjawaban pidana pelaku pertambangan Ilegal di Wonocolo memandang hukum sebagai disiplin yang preskriptif dan terapan belaka, melainkan juga kenyataan hukum.⁶ Cara yang digunakannya itu dengan memadukan sumber bahan hukum yang merupakan data Primer dengan data Sekunder yang diperoleh dari penelitian lapang.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan Yuridis Kriminologis. Yuridis sosiologis adalah pendekatan yang dimanfaatkan untuk menganalisis dan memberikan jawaban untuk mengefektifkan bekerjanya seluruh strukturi

⁵ Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 32.

⁶ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum", Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No.1 (2014), hlm. 29.

nstitusional hukum.⁷ Pendekatan hukum sosiologis/empiris menurut Soerjono Soekanto meliputi penelitian identifikasi hukum (hukum tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum.⁸ Selain itu pendekatan yuridis sosiologis yang dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif di lapangan baik berupa data, informasi, dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum, yang didapat melalui wawancara dengan akademisi yang berkompeten terkait dengan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini. Pendekatan Yuridis Kriminologis pada Penelitian ini dilakukan dengan menggali factor penyebab dari masyarakat melakukan Tindak Pidana Penambangan Ilegal. Pendekatan ini dilakukan agar masyarakat mengetahui apakah terpenuhinya unsur Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penambangan Ilegal di Wonocolo.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih yaitu Pertambangan Minyak Tanpa izini di Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten. Penelitian dilakukan di Wonocolo karena Wonocolo merupakan salah satu Pertambangan Minyak Tradisional di Indonesia, dimana dalam proses Pertambangan tersebut masih syarat akan permasalahan Hukum Khususnya pada Kegiatan Penambangan, Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga hasil Tambang secara illegal. Disini Peneliti ingin mengetahui Faktor Penyebab para pelaku penambang melakukan Penambangan secara illegal dan ingin mengkaji lebih dalam bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku pertambangan Ilegal di Wonocolo.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

⁷ Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafind Persada, Jakarta, 2003, Hlm. 73.

⁸ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 1984, Hlm. 51.

Data Primer adalah informasi yang berupa pengalaman, pemahaman, persepsi, pendapat, harapan dan lain-lain dari subyek penelitian. Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh dan didapatkan secara langsung dari narasumber dan informan yang berasal dari lokasi penelitian dan cara memperolehnya dengan melakukan wawancara kepada beberapa Penambang illegal di Wonocolo dan observasi/pengamatan untuk menguak pengalaman, pemahaman, persepsi, dan pendapat subyek penelitian secara langsung yang didapatkan dari subyek Penelitian yaitu pelaku Penambang illegal di Wonocolo.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang berupa dokumen yang terdiri dari arsip, laporan, notulensi, risalah, perjanjian dan lain-lain. Data sekunder yang digunakan penulis pada penelitian ini didapat dari arsip, laporan, notulensi, dan perjanjian.

Data sekunder dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. dokumen arsip, laporan, notulensi, risalah, perjanjian dan dari institusi yang diteliti serta penelusuran peraturan perundang-undangan melalui studi dokumen buku-buku terkait dengan penelitian, jurnal, dokumen-dokumen resmi, surat kabar, dan penelitian terdahulu yang diperoleh penulis dari Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) FHUB, Perpustakaan Pusat UB, Perpustakaan Bojonegoro. Selain itu beberapa referensi dari Internet yang didapat penulis diperoleh dari berita online, artikel. Dalam penelitian ini yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku pertambangan minyak illegal.

Adapun data sekunder yang digunakan adalah sebagai berikut:

Bahan hukum primer antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
dan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2002 tentang Pengelolaan
Kualitas Air
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun
2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi
8. Peraturan Menteri Energi dan Suber Daya Mineral Republik Indonesia
Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Energi dan Suber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
2017
9. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
Nomor: 239 K/12/MEM/2020 Tentang Penetapan Harga Minyak Mentah
Indonesia
10. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2017 tentang
Pengelolaan Sumur Tua.
- 11.

Bahan hukum sekunder,

Yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti jurnal, literatur-literatur, makalah-makalah, dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Bahan hukum tersier,

yaitu kamus-kamus yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, surat kabar dan lain sebagainya.

5. Teknik Memperoleh Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Data primer

a. Wawancara

Artinya suatu metode dalam pengumpulan data guna memperoleh data yang akurat dengan jalan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden para Penambang, penjaga museum, dan perangkat desa yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan melakukan wawancara tersebut maka akan mempermudah penulis dalam melakukan analisis data yang dihasilkan dari wawancara tersebut.

b. Metode partisipatif

dilakukan dengan melihat secara langsung dari proses kegiatan yang dilakukan oleh para Penambang di Wonocolo dan melakukan Focus Grup Discussion dengan beberapa para Penambang untuk membahas permasalahan yang terkait dengan Pertambangan Ilegal di Wonocolo.

c. Metode Observasi

dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung, ikut serta dalam suatu kegiatan untuk memahami aktivitas-aktivitas yang berlangsung, kemudian mencatat data secara sistematis terkait Pertambangan Ilegal di Wonocolo.

Data Sekunder

a. Studi Kepustakaan

Untuk memperoleh data sekunder, penulis melakukan dengan cara membaca, mencatat, atau mengutip dari perundang-undangan yang berlaku serta literatur-literatur dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Populasi dan Sampel dan Teknik Sampling

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari obyek penelitian yang memiliki kesamaan, meliputi himpunan dari orang dan atau benda, kejadian, kasus-kasus, yang dapat dibatasi pada periode dan lokasi tertentu. Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau gejala atau kejadian atau seluruh unit yang diteliti.⁹

Populasi dalam penelitian ini yang digunakan adalah seluruh pelaku penambang ilegal di Wonocolo dan pihak terkait (KUD,, PT BBS, Perangkat Desa, dan Pemerintah). pendapat diatas merupakan salah satu rujukan dari penulias untuk menentukan populasi masyarakat mana yang akan diteliti.

b. Sampling

Sampel adalah sebagian untuk diambil dari keseluruhan obyek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. penentuan jumlah sampel dengan taraf signifikan 5%.

Responden yang digunakan pada Penelitian ini adalah :

1. Responden

a. Nama : Tegar

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro. **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**. Ghalia Indonesia. Jakarta, 1994.

Jabatan : Pemilik Salah Satu Sumur Tradisional

Adapun alasan peneliti mewawancarai responden pertama, melihat Bapak Tegar selaku salah satu pemilik sumur di Wonocolo yang memiliki informasi, mengenai sejarah, penyebab konflik, penerapan hukum, dan segala proses penambangan ilegal yang dilakukan oleh para penambang di Wonocolo

b. Nama : Mugiono dan Wiranto
Jabatan : Penambang di Wonocolo

Adapun alasan peneliti mewawancarai responden kedua, melihat Bapak Mugiono dan Wiranto merupakan salah satu penambang yang melakukan kegiatan penambangan ilegal di lapangan secara langsung, yang mana kedua responden ini merupakan pihak yang melakukan kegiatan dari tahapan pengeboran, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan peniagaan secara ilegal.

c. Nama : Jasmin
Jabatan : Kepala Desa Wonocolo

Adapun alasan peneliti mewawancarai responden ketiga, melihat bapak Jasmin merupakan orang yang memiliki kewenangan penuh dalam segi pemerintahan di Wonocolo. Dan peneliti membutuhkan beberapa arsip tentang penambangan ilegal di Wonocolo yang disimpan di Balai Desa Wonocolo.

d. Nama : Ratib
Jabatan : Penjaga Museum Wonocolo

Adapun alasan peneliti mewawancarai responden keempat, melihat bapak Ratib memiliki kompetensi yang cukup untuk diwawancarai dan merupakan salah satu pihak yang netral dalam memandang konflik yang terjadi di Wonocolo. Di museum Wonocolo juga peneliti mencari beberapa arsip tentang pertambangan di Wonocolo.

e. Nama : Ali Imron

Jabatan : PLT Direktur PT BBS

Adapun alasan peneliti mewawancarai responden kelima, melihat Bapak Ali merupakan salah satu pihak yang mewakili PT BBS selaku BUMD milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang diberikan wewenang dan Legalitas untuk mengelola sumur tua di Wonocolo.

f. Nama : Sutikno

Jabatan : Ketua KUD Sumber Pangan

Adapun Peneliti mewawancarai responden keenam, melihat bapak Sutikno merupakan salah satu tokoh Desa yang diberi wewenang sebelumnya untuk mengelola KUD Sumber Pangan. Dimana KUD tersebut bersinggungan secara langsung pada para penambang.

g. Nama : Nunis Syukria. S. AB

Jabatan : Sub Bagian Bina Badan Usaha Milik Daerah

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

Adapun peneliti mewawancarai responden ketujuh, melihat ibu Nunis sebagai perwakilan dari pemerintah Kabupaten Bojonegoro, yang mengeluarkan izin bagi BUMD PT BBS untuk mengelola penambangan di Wonocolo.

c. Teknik Sampling

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan non random (*non-probability*) sampling. Dimana lebih bergantung pada kemampuan dan batasan peneliti dalam menarik sampel. Di dalam non random Peneliti menggunakan Teknik Sampling purposive sampling dan Snow-ball Sampling.

Pertama Peneliti menggunakan Purposive Sampling dimana teknik tersebut dipilih berdasarkan pertimbangan peneliti memilih sampel beberapa orang secara spesifik dari pelaku Penambang illegal, Perangkat desa, KUD, dan salah satu penjaga Museum di Wonocolo yang dianggap kooperatif dan berkompeten yang dianggap mewakili.

Kedua Peneliti Menggunakan Snow-ball Sampling dengan Cara sampel pertama, kemudian meminta rekomendasi sampel berikutnya kepada orang tersebut. Begitu pula dengan selanjutnya hingga kebutuhan survei terpenuhi. Hal ini dikarenakan sulitnya narasumber yang kooperatif dan kompeten untuk kebutuhan sampling.

6. Teknis Analisa Data

Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis dan dianalisa secara kualitatif untuk memberikan penjelasan tentang masalah yang akan dibahas. Metode ini adalah memusatkan diri pada masa sekarang yang bersifat aktual, kemudian data yang ada dikumpulkan, disusun, dijelaskan serta dianalisa. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, dan melakukan studi pada situasi yang alami berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, yaitu suatu metode

analisa data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian data tersebut dihubungkan dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari studi dokumen, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini. Tujuan digunakannya analisis deskriptif kualitatif ini adalah untuk mendapatkan pendapat tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pertambangan Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

7. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah batasan pengertian istilah yang dipergunakan dalam penelitian sesuai dengan tema penelitian. Definisi operasional dapat merujuk pada peraturan perundang-undangan, kamus, maupun pendapat ahli. Definisi operasional adalah mendefinisikan variabel secara operasional berdasarkan katakarakteristik yang diamati, sehingga memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu objek atau fenomena.

1. Tindak pidana merupakan salah satu istilah yang digunakan untuk menerjemahkan kata "*strafbaar feit*" dalam bahasa Belanda. Istilahistilahlain yang biasa digunakan sebagai terjemahan dari istilah "*strafbaar feit*" adalah perbuatan pidana, delik, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dan perbuatan yang dapat dihukum.

2. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal

hukum semata-mata melajikan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.

3. pertambangan adalah semua usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum atau badan usaha untuk mengambil bahan galian dengan tujuan untuk dimanfaatkan lebih lanjut bagi kepentingan manusia.

4. pertambangan tanpa izin/*illegal Mining*, yaitu kejahatan dalam usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ancaman sanksi pidana bagi barangsiapa yang karena kesalahannya melanggar larangan tersebut.

5. Minyak bumi adalah suatu campuran cairan yang terdiri dari berjuta-juta senyawa kimia, yang paling banyak adalah senyawa hidrokarbon yang terbentuk dari dekomposisi yang dihasilkan oleh fosil tumbuh-tumbuhan dan hewan.

BAB II**TINJAUAN PUSTAKA****1. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana****1.1 Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana merupakan salah satu istilah yang digunakan untuk menerjemahkan kata "*strafbaar feit*" dalam bahasa Belanda. Istilah-istilah lain yang biasa digunakan sebagai terjemahan dari istilah "*strafbaar feit*" adalah perbuatan pidana, delik, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dan perbuatan yang dapat dihukum. Di dalam perundang-undangan juga menggunakan beberapa istilah untuk menunjuk pengertian "*strafbaar feit*", yang antara lain dikemukakan oleh Sudarto adalah sebagai berikut:¹⁰

1. Peristiwa pidana, istilah ini antara lain digunakan dalam Undang-undang Dasar Sementara Tahun 1950 khususnya dalam pasal 14;
2. Peristiwa pidana, istilah ini digunakan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil;
3. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan dalam Undang-undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 tentang Perubahan *Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen*;
4. Hal yang diancam dengan hukum, istilah ini digunakan dalam Undang-undang Darurat Nomor 16 Tahun 1951 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan;
5. Tindak Pidana, istilah ini digunakan dalam berbagai undang-undang,

¹⁰ Tongat. 2012. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press. Hlm 91-92

Menurut Simon, *strafbaar feit* adalah "kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab". Sedangkan menurut Van Hamel, "*strafbaar feit* adalah kelakuan orang yang bersifat melawan hukum dan dapat dipidana". Berangkat dari pendapat-pendapat tersebut maka dapat penulis simpulkan bahwa *strafbaar feit* atau tindak pidana adalah suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang yang apabila dilanggar maka akan mendapatkan sanksi pidana.¹¹ Di dalam peraturan perundang-undangan terdapat banyak istilah yang digunakan dimana istilah tersebut memiliki kesamaan arti dengan tindak pidana, antara lain peristiwa pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, delik, pelanggaran pidana, dan lain-lain.

1.2 Unsur-unsur Tindak Pidana

Berdasarkan pendapat Adami Chazawi, unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari 2 (dua) sudut pandang yakni:

- a. Dari sudut pandang teoritis serta sudut pandang undang-undang. Maksud teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sedangkan sudut UU adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan.¹⁷ Konsep mengenai unsur-unsur tindak pidana secara teoritis akan lebih jelas ketika kita membaca definisi-definisi mengenai tindak pidana dari masing-masing ahli, seperti definisi yang diberikan Simon, Van Hamel dan ahli-ahli hukum pidana lainnya. Tentunya unsur-unsur ini tidak sama antara ahli yang satu dan lainnya, namun tidak berbeda jauh. Begitu pula mengenai konsep unsur-unsur

¹¹ Moeljatno, 1985. *Azaz-azaz Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara. Hlm 63

tindak pidana menurut undang-undang akan lebih jelas ketika kita membaca pasal-pasal dalam perundangundangan yang berlaku.

1.3 Unsur Tindak Pidana Secara Teoritis

Menurut Moeljatno, unsur atau elemen perbuatan pidana adalah sebagai berikut:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang obyektif;
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.

Perlu ditekankan lagi bahwa sekalipun dalam rumusan delik tidak terdapat unsur melawan hukum, namun jangan dikira bahwa perbuatan tersebut lalu tidak bersifat melawan hukum. Perbuatan tadi sudah sedemikian wajar sifat melawan hukumnya, sehingga tak perlu untuk dinyatakan sendiri. Bahwa meskipun perbuatan pidana pada umumnya adalah keadaan lahir dan terdiri atas elemen-elemen lahir, namun ada kalanya dalam perumusan juga diperlukan elemen batin yaitu sifat melawan hukum yang subjektif.¹²

Sedangkan menurut Jonkers, unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. Dipertanggung jawabkan.

Mengenai kapan unsur melawan hukum itu berupa melawan hukum obyektif atau subyektif, bergantung dari bunyi redaksi rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Unsur yang bersifat obyektif adalah semua unsur yang

¹² Moeljatno, *ibid.*, p. 63

berada diluar keadaan batin manusia/si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatannya dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan obyek tindak pidana. Sedangkan unsur yang bersifat subyektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.¹³ Unsur tindak pidana yang berupa kesalahan dan melawan hukum merupakan unsur yang bersifat subyektif. Namun hal ini tidak berlaku terhadap seluruh pasal dalam KUHP, seperti dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian, Pasal 251 KUHP dan Pasal 253 KUHP yang terdapat di dalamnya unsur melawan hukum yang obyektif. Unsur melawan hukum yang bersifat subyektif, beberapa contohnya terdapat dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan, pasal 368 KUHP tentang pemerasan, Pasal 369 KUHP tentang pengancaman, dan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan.

1.4 Jenis-jenis Tindak Pidana

Adam Chazawi berpendapat bahwa tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III.
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*). Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*).
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta*

¹³ Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta, PT RajaGrafindo, 2018, Hlm117-119

commissionis) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*).

5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.

6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

7. Dilihat dari sudut subyek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communis* (*delicta communis*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja) dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu).

8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*).

9. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*), dan tindak pidana yang diper ringan (*geprivilegieerde delicten*).

10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.

11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkeltvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).

Roeslan Saleh berpendapat "baik kejahatan dan pelanggaran adalah perbuatan pidana yaitu perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang

dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁴

2. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana

2.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Kemampuan bertanggung jawab, menurut Kitab Undang-undang Pidana Indonesia seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, menurut para ahli ada beberapa pengertian Pertanggungjawaban Pidana :

1. Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹⁵
2. Simons sebagaimana dikutip Hilman Hadikusuma
Simons menyatakan kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychis* sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun orangnya, kemudian Simons menyatakan bahwa seseorang mampu bertanggung jawab.
3. Van Hamel sebagaimana dikutip EY Kanter dan SR Sianturi
Van Hamel menyatakan bahwa pertanggung jawaban pidana adalah suatu keadaan normalitas *psychis* dan kematangan yang membawa adanya kemampuan pada diri perilaku.
4. Van Bemmelen sebagaimana dikutip EY Kanter dan SR Sianturi

¹⁴ Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta:Aksara Baru. Hlm 107

¹⁵ Roeslan saleh, *op. cit.*, p., hlm-33

Van Bemmelen menyatakan bahwa seseorang dapat dipertanggung jawabkan ialah orang yang dapat mempertahankan hidupnya dengan cara yang patut Tindak pidana.

Dalam bahasa inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.¹⁶ Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.¹⁷

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut

¹⁶ Hanafi, Mahrus, *op. cit.*, p., hlm-16

¹⁷ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, hlm-68

kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai system pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang. tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.¹⁸ Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggung jawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

2.2 Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas

¹⁸ Hanafi Amrani, *op. cit.*, p. , hlm-52

untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.¹⁹

Dalam hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana "tidak dipidana jika tidak ada kesalahan". Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

2.3 Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus

¹⁹ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 335-337

terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah:

a. Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.²⁰

Dalam hukum pidana Indonesia menghendaki perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak kelaur, karena didalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang, hal ini asas *cogitationis poenam nemo patitur*, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja.²¹

b. Unsur kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.

Pengertian kesalahan di sini digunakan dalam arti luas. Dalam KUHP

²⁰ Moeljalento, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi revisi*, Jakarta, Renika Cipta, hlm-25

²¹ Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm-85

kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda yang berada dalam pasal 359 dan 360. Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi maupun dalam arti normative. Kesalahan psikologis adalah kejahatan yang sesungguhnya dari seseorang, kesalahan psikologis ini adalah kesalahan yang ada dalam diri seseorang, kesalahan mengenai apa yang orang itu pikirkan dan batinnya rasakan, kesalahan psikologis ini sulit untuk dibuktikan karena bentuknya tidak real, kesalahan psikologis susah dibuktikan karena wujudnya tidak dapat diketahui. dalam hukum pidana di Indonesia sendiri yang digunakan adalah kesalahan dalam arti normative. Kesalahan normative adalah kesalahan adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain mengenai suatu perbuatan seseorang. Kesalahan normative merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan. Dari suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalahan baik disengaja maupun karena suatu kesalahan kealpaan.

a) Kesengajaan

Dalam tindak pidana kebanyakan di Indonesia memiliki unsur kesengajaan atau *opzettelijk* bukan unsur *culpa*. Hal ini berkaitan bahwa orang yang lebih pantas mendapatkan hukuman adalah orang yang melakukan hal tersebut atau melakukan tindak pidana dengan unsur kesengajaan. Mengenai unsur kesalahan yang disengaja ini tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui bahwa perbuatannya diancam oleh undang-undang, sehingga tidak perlu dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan

yang bersifat "jahat". Sudah cukup dengan membuktikan bahwa pelaku menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui konsekuensi atas perbuatannya. Hal ini sejalan dengan adagium fiksi, yang menyatakan bahwa seetiap orang dianggap mengetahui isi undang-undang, sehingga di anggap bahawa seseorang mengetahui tentang hukum, karena seseorang tidak dapat menghindari aturan hukum dengan alasan tidak mengetahui hukum atau tidak mengetahui bahwa hal itu dilarang. Kesengajaan telah berkembang dalam yurisprudensi dan doktrin sehingga umumnya telah diterima beberapa bentuk kesengajaan, yaitu :²²

1. Sengaja sebagai maksud

Sengaja sebagai maksud dalam kejahatan bentuk ini pelaku benar-benar menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) atas perbuatan dan akibat dari perbuatan yang pelaku perbuatan.²³ Hal mengetahui dan menghendaki ini harus dilihat dari sudut pandang kesalahan normative, yaitu berdasarkan peristiwa-peristiwa konkret orang-orang akan menilai apakah perbuatan tersebut memang dikehendaki dan diketahui oleh pelakunya. Kesalahan dengan kesengajaan sebagai maksud sipelaku dapat dipertanggungjawabkan, kesangjaan sebagi maksud ini adalah bentuk yang mudah dimengerti oleh khalayak masyarakat. Apabila kesengajaan dengan maksud ini ada pada suatu tindak pidana dimana tidak ada yang

²² *Ibid*, hlm-121 *Ibid*,

²³ *Ibid*, hlm-122

menyangkal maka pelaku pantas dikenakan hukuman pidana yang lebih berat apabila dapat dibuktikan bahwa dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku benar-benar suatu perbuatan yang disengaja dengan maksud, dapat dikatakan sipelaku benar-benar menghendaki dan ingin mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana.

2. Sengaja sebagai suatu keharusan

Kesengajaan semacam ini terjadi apabila sipelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat dari perbuatannya, tetapi ia melakukan perbuatan itu sebagai keharusan untuk mencapai tujuan yang lain. Artinya kesengajaan dalam bentuk ini, pelaku menyadari perbuatan yang ia kehendaki namun pelaku tidak menghendaki akibat dari perbuatan yang telah ia perbuat.

3. Sengaja Sebagai kemungkinan

Dalam sengaja sebagai kemungkinan, pelaku sebenarnya tidak menghendaki akibat perbuatannya itu, tetapi pelaku sebelumnya telah mengetahuai bahwa akibat itu kemungkinan juga dapat terjadi, namun pelaku tetap melakukan perbuatannya dengan mengambil resiko tersebut.

b) Kealpaan (*culpa*)

Moeljatno mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu struktur *gecompliceerd* yang disatu sisi mengarah kepada perbuatan seseorang secara konkret sedangkan disisi lain mengarah kepada keadaan batin seseorang. Kelalaiin terbagi menjadi dua yaitu kelalaian yang ia sadari (alpa) dan kelalaiin yang ia tidak sadari (lalai). Dalam pasal-pasal KUHPidana sendiri tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kealpaan. Sehingga untuk mengerti apa yang dimaksud dengan kealpaan maka memerlukan pendapat para ahli hukum. Kelalaiin merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar yang telah ditentukan, kelalaiin itu terjadi karena perilaku dari orang itu sendiri. Kelalaiin yang ia sadari atau alpa adalah kelalaiin yang ia sadari, dimana pelaku menyadari dengan adanya resiko namun tetap melakukan dengan mengambil resiko dan berharap akibat buruk atau resiko buruk tidak akan terjadi. Sedangkan yang dimaksud dengan kelalaiin yang tidak disadari atau lalai adalah seseorang tidak menyadari adanya resiko atau kejadian yang buruk akibat dari perbuatan ia lakukan pelaku berbuat demikian dikarenakan antara lain karena kurang berpikir atau juga bisa terjadi karena pelaku lengah dengan adanya resiko yang buruk. Kelalaiin yang disadari adalah kelalaiin yang disadari oleh seseorang apabila ia tidak melakukan suatu perbuatan maka akan timbul suatu akibat yang dilarang oleh hukum pidana, sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan yang ia tidak sadari adalah pelaku tidak memikirkan akibat dari perbuatan yang ia lakukan dan apabila ia memikirkan akibat dari perbuatan itu maka ia tidak akan melakukannya.

c. Adanya pembuat yang dapat bertanggung jawab

Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan psycis pembuat. Kemapuan bertanggungjawab ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggungjawaban menjdai salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar untuk menentukan pemidanaan kepada pembuat. Kemampuan bertanggung jawab ini harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidak dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana. Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa kebanyakan Undnag-Undang merumuskan syarat kesalahan secara negative. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur tentang kemampuan bertanggung jawab namun yang diatur dalam KUHP sendiri justru kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab.²⁴ Pasal yang mengatur tentang kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab adalah pasal 44 KUHP yang berbunyi ;

1. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontiwikkeling*) atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana
2. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

²⁴ Andi Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, cetakan ke-2, Jakarta, Sinar Grafika, hlm-260

Dalam pasal 44 ini seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah ia lakukan apabila tidak memiliki unsur kemampuan bertanggung jawab, ketidak mampuan untuk bertanggung jawab apabila didalam diri pelaku terdapat kesalahan, kesalahan tersebut ada 2 yaitu ;

1. Dalam masa pertumbuhan pelaku, pelaku mengalami cacat mental, sehingga hal itu mempengaruhi pelaku untuk membedakan anantara perbuatan yang baik dan buruk.

2. Jika jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan suatu penyakit, sehingga akal nya kurang berfungsi

secara optimal atau akal nya tidak berfungsi secara optimal untuk membedakan hal-hal yang baik dan buruk. Kemampuan bertanggung jawab juga berhubungan dengan umur tertentu bagi pelaku tindak pidana. Artinya hanya pelaku yang memenuhi batas umur tertentu yang memiliki kemampuan bertanggung jawab serta memiliki kewajiban pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, hal ini dikarenakan karena pada umur tertentu secara *psycologi* dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Pada dasarnya anak pada umur tertentu belum dapat menyadari dengan baik apa yang telah dilakukan, artinya anak pada umur tertentu juga tidak dapat memisahkan mana yang baik dan mana yang salah tentu juga hal ini mempengaruhi anak tidak dapat menginsafkan perbuatannya. Apabila anak pada

tertentu melakukan tindak pidana dan oleh karena perbuatannya dilakukan proses pidana maka secara psikologi anak tersebut akan terganggu dimasa dewasanya.²⁵

Dalam proses pemidanaan nya hakim wajib mencari dan membuktikan apakah pelaku memiliki unsur kemampuan bertanggung jawab, sebab apabila pelaku tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab baik karena usia yang belum cukup umur, atau dikarenakan keadaan psikologi seseorang terganggu maka orang tersebut tidak dapat diminta pertanggung jawabannya.

d. Tidak ada alasan pemaaf

Dalam keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak di inginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku nya harus menghadi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena factor-faktor dari luar dirinya.

Factor-faktor dari luar dirinya atau batinnya itulah yang menyebabkan pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain yang mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus. Artinya, berkaitan dengan hal ini pembuat tindak pidana terdapat alasan penghapusan pidana, sehingga pertanggungjawaban berkaitan dengan hal ini ditunggukan sampai dapat dipastikan ada tidaknya unsur alasan pemaaf dalam diri pelaku pembuat tindak pidana tersebut. Dalam hal

²⁵ Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm-80

ini sekalipun pelaku pembuat tindak pidana dapat dicela namun celaan tersebut tidak dapat dilanjutkan kepadanya karena pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain selain melakukan tindak pidana tersebut.

Dalam doktrin hukum pidana alasan pemaaf dan alasan membenar, alasan membenar adalah suatu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Alasan membenar dan alasan pemaaf ini dibedakan karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Adanya perbedaan ini karena alasan membenar adalah suatu alasan "pembenaran" atas suatu tindak pidana yang melawan hukum sedangkan alasan pemaaf berujung pada "pemaafan" terhadap seseorang sekalipun telah melakukan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang telah diperbuat.²⁶

Dalam hukum pidana yang termasuk alasan membenar seperti keadaan darurat, pembelaan terpaksa, Menjalankan peraturan perundang-undangan, menjalankan perintah jabatan yang sah. Keadaan darurat merupakan salah satu alasan membenar, yaitu suatu alasan karena seseorang menghadapi dilema situasi untuk memilih suatu tindakan. Keadaan darurat ini sebagai salah satu bentuk *via compulsive* terjadi dalam tiga kemungkinan. Kemungkinan *Pertama* terjepit dimana seseorang memilih diantara dua kepentingan yang sama-sama²⁷ Kemungkinan yang ketiga adalah seseorang ditempatkan pada situasi terjepit diantara dua kewajiban. Pembelaan Terpaksa berada dalam pasal 49 ayat 1 KUHP ditentukan syarat-syarat dimana melakukan suatu delik untuk membela diri dapat dibenarkan. Untuk itu undang-undang menentukan syarat-syarat yang sangat ketat, meneurut pasal 49 ayat 1 KUHP untuk pepbelaan terpaksa

²⁶ Chairul Huda, 2006, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana, hlm-116

²⁷ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, Op.Cit, hlm-45

disyaratkan adanya serangan mendadak atau seketika itu terhadap raga, kehormatan kesusilaan atau harta benda, serangan itu bersifat melawan hukum, dalam hal ini pembelaan adalah suatu keharusan.

Pembelaan terpaksa ini dimaksudkan adalah pembelaan yang dilakukan ketika ada suatu serangan yang akan terjadi. Pembelaan terpaksa ini terjadi apabila seseorang tidak melakukan pembelaan diri maka suatu hal yang buruk akan terjadi atau apabila tidak melakukan pembelaan maka menepatkan seseorang dalam keadaan yang merugikan dan membahayakan.

Menjalankan Peraturan Perundang-undangan, hal ini terjadi apabila seseorang dihadapkan dalam dua kewajiban, dalam hal ini seseorang harus melakukan suatu perbuatan sesuai keadaan yang terjadi dan tidak mengabaikan Undang-Undang. contohnya apabila ada seseorang yang melanggar lalu lintas maka petugas kepolisian diperbolehkan menghentikan pelaku pelanggar lalu lintas tersebut namun dilarang untuk menembak orang tersebut, jika keadaannya berubah seseorang yang melanggar lalu lintas tersebut adalah tersangka utama yang ada dalam pengejaran kepolisian maka petugas diperbolehkan menembak seseorang tersebut.

Menjalankan Perintah Jabatan Yang Sah. Suatu perintah jabatan mengandaikan suatu hubungan hukum public antara yang memerintah dan yang diperintah. Hal ini artinya seseorang dalam menjalankan perintah jabatan tidak dapat dihukum, karena seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan dengan perintah dan sarana yang patut.

Dalam hukum pidana yang dimaksud dengan alasan pemaaaf adalah hukum pidana adalah tidak mampu bertanggungjawab, daya paksa, pembelaan terpaksa melampaui batas.²⁸ mengenai ketidakmampuan bertanggung jawab telah dijabarkan sebelumnya, hal ini

²⁸ Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, 1995, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, hlm-59

berkaitan dengan keadaan seseorang dapat atau tidak diri seorang pelaku tersebut melakukan pertanggungjawaban mengenai suatu hal yang telah diperbuat. Daya paksa, dalam KUHP daya paksa diatur didalam pasal 48 yang menyatakan "barang siapa seseorang yang melakukan suatu tindak pidana karena atas dorongan daya paksa, maka tidak dapat dipidana". Pada kata dorongan hal itu mengisyaratkan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut dalam keadaan paksaan secara psikologis. Tekanan psikologi tersebut dapat ada karena tindakan sekita seseorang atau tekanan atau dorongan tersebut memang telah lama ada dan dalam suatu waktu tekanan tersebut meledak.²⁹ Pembelaan terpaksa melampaui batas, apabila pembelaan terpaksa merupakan salah satu alasan pembeda maka dalam pembelaan terpaksa melampaui batas masuk dalam alasan pemaaf, hal ini karena pembelaan terpaksa melampaui batas dapat dicela namun tidak dapat dipidana. Diberi contoh seseorang yang sedang memasak didapur dihadapkan maling dirumahnya yang memegang pisau maka untuk membela dirinya orang tersebut menusuk maling tersebut dengan pisau hingga meninggal. Berkaitan dengan hal ini hakim harus menggali apakah seseorang tersebut tidak pidana karena suatu alasan pemaaf atau karena alasan pembeda.³⁰

8. Tinjauan Umum tentang Pertambangan Ilegal (Tanpa izin)

3.1 Pengertian Pertambangan

²⁹ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm-47

³⁰ Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, *Op.Cit*, hlm-69

Menurut Sukandarrumidi usaha pertambangan adalah semua usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum atau badan usaha untuk mengambil bahan galian dengan tujuan untuk dimanfaatkan lebih lanjut bagi kepentingan manusia. Sedangkan kegiatan penambangan adalah serangkaian kegiatan dari mencari dan mempelajari kelayakan sampai dengan pemanfaatan mineral, baik untuk kepentingan perusahaan, masyarakat sekitar, maupun pemerintah (daerah dan pusat).³¹ Dalam peraturan pemerintah yang dimaksud dengan penambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pemurnian pengangkutan dan penjualan, serata kegiatan pasca tambang.³²

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan menambang adalah menggali (mengambil) barang tambang dari dalam tanah. Kemudian, Abrar Saleng menyatakan bahwa usaha pertambangan pada hakikatnya ialah usaha pengambilan bahan galian dari dalam bumi.³³

Dari pengertian-pengertian pertambangan di atas, dapat diketahui bahwa pertambangan adalah suatu usaha mengambil dan memanfaatkan bahan-bahan galian.

3.2 Pengertian Pertambangan Tanpa izin

Di Indonesia kegiatan pertambangan tradisional yang dilakukan rakyat dengan peralatan sederhana tidak terikat dengan perizinan formal dan seringkali "liar" diberi nama dengan kegiatan PETI (Pertambangan Tanpa Izin).

³¹ Sukandarrumidi, bahan-bahan galian industri. (Yogyakarta: gadjah mada, University press,tt), h.38.

³² Tim redaksi pustaka Yustisia, kumpulan Peraturan Pemerintah 2010 tentang pertambangan, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia), h. 2.

³³ Abrar Saleng, Hukum Pertambangan, UII Press, Yogyakarta, 2004, Hal:90

Di dalam "Deklarasi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat pertambangan" yang diorganisasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan pada tahun 2015, didapat beberapa keterangan mengenai PETI di Indonesia sebagai di bawah ini.

Kegiatan PETI menyebar nyaris di hampir semua wilayah di kepulauan Indonesia (Jabar, Jatim, Babel, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua, dst.), dengan ribuan lokasi Di Indonesia, pertambangan rakyat skala kecil atau PETI dianggap sebagai kegiatan yang melawan hukum, terutama karena para penambang tersebut tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan sebagai layaknya sebuah Badan Usaha. Mereka tidak membayar pajak dan royalti yang merupakan sumber pendapatan negara dari kegiatan pertambangan. Kegiatan mereka juga sering menyebabkan keresahan sosial dan kerusakan lingkungan. Namun tindakan "penegakan hukum" terhadap para penambang PETI tersebut juga kadang dilakukan dengan setengah hati terutama karena besarnya jumlah penambang yang telah melakukan kegiatan tersebut secara turun temurun di lokasi nenek moyang mereka (bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka), dan juga secara ekonomi kegiatan mereka telah membantu mengurangi kemiskinan dan pengangguran yang masih menjadi masalah bagi ekonomi lokal di banyak daerah di Indonesia.³⁴

Dalam Bahasa Inggris kegiatan pertambangan tanpa izin dikenal dengan istilah *illegal mining*. Secara terminologi istilah *illegal mining* terdiri dari 2 kata, yaitu :

- a. *Illegal*, yang artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum.
- b. *Mining*, yang artinya penggalian bagian dari tanah yang mengandung logam berharga didalam tanah atau bebatuan.

³⁴ Hanan Nugroho, " *Pandemi Covid-19: Tinjau Ulang Kebijakan Mengenai PETI (Pertambangan Tanpa Izin) di Indonesia*"

The Indonesian Journal of Development Planning Volume IV No. 2 – Juni 2020, Hal. 121

Berdasarkan uraian diatas, penulis mencoba mengemukakan definisi dari kejahatan pertambangan tanpa izin/*illegal Mining*, yaitu kejahatan dalam usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ancaman sanksi pidana bagi barangsiapa yang karena kesalahannya melanggar larangan tersebut.

Dengan demikian, izin, rekomendasi, atau bentuk apapun yang diberikan kepada perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan/yayasan oleh instansi pemerintah diluar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dapat dikategorikan sebagai pertambangan tanpa izin/*illegal mining*. Dalam proses pertambangan tanpa izin/*illegal mining* kerap terjadi

Illegal drilling merupakan salah satu kejahatan *illegal mining* yang sering terjadi untuk memperoleh minyak bumi dengan cara mengambil dari perut bumi. Penambangan ini dilakukan dengan cara membuat sumur-sumur minyak di kedalaman tertentu. Selanjutnya minyak diambil dengan menggunakan alat tertentu dan dilakukan *illegal refining* atau penyulingan minyak ilegal. Kegiatan ilegal ini memberikan dampak buruk terhadap lingkungan, perekonomian negara dan keselamatan masyarakat sekitar

3.3 Pertambangan Tanpa izin Menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan gas Bumi

Berdasarkan Pasal 1 ayat 20 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan gas Bumi Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. Dengan demikian segala jenis kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang tidak dilakukan dengan Prosedur yang telah ditentukan Oleh Undang – undang dapat dikatakan suatu Tindak Pidana yang telah diatur dalam BAB XI

KETENTUAN PIDANA Pasal 51 sampai Pasal 58 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan gas Bumi. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 adalah pelanggaran SEDANGKAN Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55 adalah kejahatan Secara khusus Pasal yang berkenaan dengan Pertambangan Tanpa izin diatur dalam Pasal 52 dan 53 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan gas Bumi yang berbunyi;

Pasal 52

Setiap orang yang melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa mempunyai Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Pasal 53

Setiap orang yang melakukan :

- a. Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- b. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
- c. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);

d. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00(tiga puluh miliar rupiah)³⁵

4. Tinjauan Umum tentang Minyak bumi

4.1 Pengertian Minyak bumi

Minyak bumi adalah suatu campuran cairan yang terdiri dari berjuta-juta senyawa kimia, yang paling banyak adalah senyawa hidrokarbon yang terbentuk dari dekomposisi yang dihasilkan oleh fosil tumbuh-tumbuhan dan hewan. Minyak bumi dan derivat minyak bumi menghasilkan bahan bakar kendaraan bermotor, pesawat terbang dan kereta api. Tumbuhan dan hewan juga menghasilkan minyak pelumas yang dibutuhkan untuk alat-alat mesin industri.

Minyak bumi merupakan senyawaan kimia yang terdiri dari unsur-unsur karbon, hidrogen, sulfur, oksigen, halogenida dan logam. Senyawa yang hanya terdiri dari unsur karbon dan hidrogen dikelompokkan kedalam senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon diklasifikasikan atas naftanik, farafinik dan aromatik sedangkan senyawa campuran antara unsur karbon, hidrogen, halogenida dan logam, dikelompokkan dalam senyawa non hidrokarbon. (Sunarko, 2001)³⁶ Minyak bumi mengandung 50-98% komponen hidrokarbon dan non hidrokarbon. Dalam bahasa Inggris minyak bumi disebut "*Petroleum*", yang berasal dari bahasa Latin "*Petrus*" yang berarti karang serta "*Oleum*"

³⁵ Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan gas Bumi

yang berarti minyak. Di dunia Internasional minyak bumi di juluki sebagai emas hitam hal ini disebabkan minyak bumi sangatlah berharga dan banyak yang membutuhkannya. Unsur yang terkandung didalam minyak bumi sangatlah kompleks dari berbagai hidrokarbon.

Minyak bumi berasal dari sisa pelapukan organisme makhluk hidup dan sering kali disebut sebagai bahan bakar fosil. Minyak bumi berasal dari tumbuhan, jasad renik dan hewan yang mati. Sisa organisme itu mengendap di perut bumi yang kemudian tertutup lumpur. Lumpur tersebut mengalami proses perubahan menjadi batuan sedimen karena adanya tekanan dari lapisan di atasnya. Meningkatnya tekanan dan suhu membuat bakteri anaerob menguraikan sisa jasad renik itu menjadi minyak dan gas bumi. Dalam minyak bumi terdapat banyak unsur, yaitu karbon (C), Hidrogen (H), Sulfur (S), Oksigen (O), Nitrogen (N), dan Logam.

a. Pengertian minyak bumi menurut para ahli:

a). Mendeleyev (1877)

Minyak bumi terbentuk akibat adanya pengaruh kerja uap pada karbida-karbida logam dalam bumi.²⁰

b). Barth Barthelot (1866)

Di dalam minyak bumi terdapat logam alkali, yang dalam keadaan bebas dengan temperatur tinggi akan bersentuhan dengan CO₂ membentuk asitilena.³⁷

c). International Monetary Fund (IMF)

Minyak bumi adalah minyak yang digunakan untuk memproduksi berbagai macam barang dan material yang menjadi kebutuhan manusia. Penggunaan minyak bumi menghasilkan gas Co yang memicu berbagai polusi seperti penggunaan batubara sehingga

³⁷ Migasnet, "Teori Minyak Bumi", <http://migasnet11rizki8002.blogspot.sg/2010/01/teori-pembentukan-minyak-bumi.html>, (diakses pada tanggal 19 Oktober 2020, pukul 23.42).

penggunaan minyak bumi perlu diatur dan dikendalikan agar tidak mencemari lingkungan.³⁸

b. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Zat cair berlemak, biasanya kental, tidak larut dalam air, larut dalam eter dan alkohol, mudah terbakar, bergantung pada asalnya, dikelompokkan sebagai minyak nabati, hewani, atau mineral dan bergantung pada sifatnya terhadap pemanasan dapat dikelompokkan sebagai asiri atau tetap.³⁹

c. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Migas

Minyak adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

4.2 Tujuan Pengelolaan Gas Bumi

Terdapat beberapa asas penting dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yakni ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan. Undang-undang menentukan bahwa penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi bertujuan:

³⁸ "5 Pengertian Minyak Bumi Menurut Para Ahli", <http://www.indonesiastudents.com/pengertian-minyak-bumi-menurut-para-ahli/>, (diakses pada tanggal 19 Oktober 2020, pukul 20.22).

³⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,

a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi secara berdaya guna, berhasil guna, serta berdaya saing tinggi dan berkelanjutan atas Minyak dan Gas Bumi milik negara yang strategis dan tidak terbarukan melalui mekanisme yang terbuka dan transparan;

b. meningkatkan pendapatan negara untuk memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional dan mengembangkan serta memperkuat posisi industri dan perdagangan Indonesia;

c. menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

d. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga secara akuntabel yang diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan;

e. menjamin efisiensi dan efektivitas tersedianya Minyak Bumi dan Gas Bumi, baik sebagai sumber energi maupun sebagai bahan baku, untuk kebutuhan dalam negeri;

f. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional untuk lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;

⁴⁰ Sulaiman, "Rekonstruksi Hukum Minyak dan Gas Bumi yang Berkeadilan di Indonesia", Jurnal Hukum Vol. 18, No. 2, 2016, Hal. 221-2222

BAB III**HASIL DAN PEMBAHASAN****a) Gambaran Umum Lokasi Penelitian****1. Deskripsi Umum Kabupaten Bojonegoro**

Kabupaten Bojonegoro memiliki luas sejumlah 230.706 Ha, dengan jumlah penduduk sebesar 1.301.635 jiwa merupakan bagian dari wilayah Propinsi Jawa Timur dengan jarak kurang lebih 110 Km dari ibu kota Propinsi Jawa Timur dan terletak pada 111o 25' dan 112o 09' BT serta 6o 59' dan 7o 37' LS. kota ini mempunyai hasil tambang berupa simpanan minyak yang sangat melimpah. Lihat saja, di kecamatan Gayam (Mojodelik, Brobohan, Wonorejo) yang mana terkandung minyak bumi $\pm 600.000.000$ barel (kurang lebih 600 juta barel) dan dapat diproduksi ± 160.000 barel/hari. Sebagai pengelolanya Exxon Mobile. Ada juga di kecamatan Kapas (Sukowati) yang mana minyak bumi sudah dikelola sebesar 7.100 barel/hari yang dikelola oleh Petro cina. Di kecamatan Kedewan (Desa Wonocolo, Hargomulyo, dan Beji) dengan total 700 unit sumur dengan kapasitas produksi ± 46.791 liter/hari.⁴¹ Topografi Kabupaten Bojonegoro menunjukkan bahwa disepanjang daerah aliran sungai Bengawan Solo merupakan daerah dataran rendah, sedangkan di bagian selatan merupakan dataran tinggi disepanjang Gunung Pandan, Kramat dan Gajah. Dari wilayah seluas di atas, sebanyak 40, 15 persen merupakan hutan negara, sedangkan yang digunakan untuk sawah tercatat sekitar 32, 58 persen. Kabupaten Bojonegoro memiliki perbatasan dengan daerah lain yaitu ;

⁴¹ <https://www.kompasiana.com/tiararisadamayanti/565a5dedd57a6145048b4584/selamat-datang-di-kota-bojonegoro?page=all#:~:text=Bojonegoro%20merupakan%20salah%20satu%20kota,memiliki%20hutan%20hijau%20yang%20luas.> (diakses pada tanggal 10 April 2021, pukul 08.13).

Tabel 2

Batas Wilayah kabupaten Bojonegoro

No.	Mata Angin	Kabupaten/Kota
1	Utara	Kabupaten Tuban
2	Selatan	Kabupaten Madiun Jombang, dan Nganjuk
3	Barat	Kabupaten Ngawi dan Blora (Jawa Tengah)
4	Timur	Kabupaten Lamongan

*Sumber PPID Kabupaten Bojonegoro***2. Deskripsi Umum Wilayah Wonocolo****a. Letak Geografis**

Dari Letak Geografis sendiri, Wonocolo salah satu desa yang ada di Kecamatan Kedewan. Kecamatan Kedewan termasuk wilayah geografis Kabupaten Bojonegoro yang terdiri dari lima desa dan terletak di sebelah barat pusat pemerintahan Kabupaten Bojonegoro. Desa tersebut adalah Kawengan, Wonocolo, Hargomulyo, Kedewan, Beji. Luas wilayah 56,51 Km² terdiri dari dataran tinggi di sepanjang Bengawan Solo, yang dihuni oleh 3.316 kepala keluarga dan berpenduduk 12.619 jiwa Wonocolo ini terletak di dataran yang tinggi atau dipegunungan yang memiliki luas 140.002 Ha atau 11,37km², berjarak 5 km dari Kecamatan Kedewan dan 58km dari Kota Bojonegoro, dan memiliki sawah 5 hektare dan tanah yang kering sekitar 1.113Ha.

Adapun batas-batas desa Wonocolo sebagai berikut :

Tabel 3

Batas Wilayah Desa Wonocolo

No.	Mata Angin	Kabupaten/Kota
1	Utara	Kaligede Senori-Tuban
2	Selatan	Sekaran Kasiman
3	Barat	Kedewan
4	Timur	Kawengan Kedewan

*Sumber : Daftar Isian tingkat Potensi dan Tingkat Perkembangan Desa
Wonocolo Tahun 2020*

b. Kondisi Ekosistem

(a). Sungai

Keberadaan sungai akibat aktifitas penambangan sumur minyak tua atau minyak mentah yang ditengarai dari sumur minyak tua di Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur mencemari sungai yang bermuara di Bengawan Solo. Sungai tersebut berada di perbatasan antara Desa Batokan, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro dengan Kelurahan Ngelo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Lantung itu mengalir bercampur dengan aliran sungai sehingga menjadikan warna air berubah kecokelatan dan menimbulkan bau tak sedap.

(b).Tanah

Jenis tanah yang berada di Desa Wonocolo merupakan jenis tanah kapur. Para Petani di Desa Wonocolo berbeda dengan petani pada umumnya, karena struktur tanah di Desa Wonocolo adalah tanah kapur yang tidak cocok digunakan untuk lahan pertanian.

(c).Udara

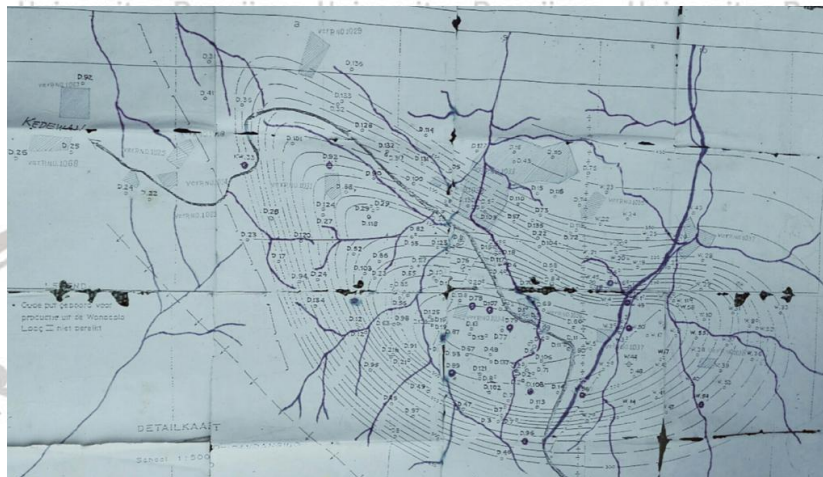
Produksi minyak bumi yang dilakukan secara tradisional tanpa adanya pengelolaan sesuai standart operasional procedure akan menimbulkan dampak di lingkungan sekitar. Menurut Pertamina (2012), eksploitasi produksi minyak bumi melibatkan aspek kegiatan yang beresiko terjadi pencemaran. Eksploitasi dalam membongkar permukaan bebatuan atau tanah dengan kegiatan proses pengambilan bijih dan peleburan serta penyulingan minyak dapat menyebabkan hamburan dan penimbunan sejumlah besar logam seperti HG, Cd, Pb dan As ke saluran pembuangan disekitarnya

c. Prasarana Umum Desa

Jalan lingkungan yang menghubungkan anatar dukuh didesa Wonocolo sebagaian sudah diaspal, sebagian sudah dicor dan ada juga jalan masih makadam. Fasilitas pendidikan yang ada terdiri dari sebuah Playgroup, TK dan SD untuk melanjutkan sekolah setingkat SMP, anakanak desa Wonocolo harus keluar dari desa Wonocolo. SMP nya berada di Kedewan atau di Kasiman, untuk tingkat SMA biasanya anak-anak desa Wonocolo melanjutkan SMA nya di Kecamatan Kasiman, Kota Cepu atau Kota Bojonegoro, karena dikecamatan Kedewan tidak tersedia. Fasilitas kesehatan yang ada didesa Wonocolo yaitu Puskesmas. Pembantu dan sebuah Balai Pengobatan. Sedangkan Posyandu yang ada sebanyak 2 buah. Sedangkan fasilitas olahraga berupa lapangan sepak bola.

1. Gambaran Umum Tentang Penambang Minyak Tradisional Wonocolo

a. Sejarah sumur minyak bumi yang ada di Desa Wonocolo

Gambar 1**Gambar Peta Sumur minyak Wonocolo Jaman Belanda**

Sumber : Dokumentasi Arsip di kantor Kepala desa Wonocolo

Sumur-sumur minyak bumi yang ada di Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro telah ada sejak Jaman Belanda pada tahun 1894, sumur-sumur minyak tua di Wonocolo merupakan salah satu saksi penjajahan yang dilakukan oleh Belanda kepada Indonesia. Sumur-sumur tersebut digunakan dan dioperasikan fungsinya oleh Belanda sejak pada jaman penjajahan, Setelah Belanda kalah perang dan sebelum meninggalkan Indonesia, Belanda menimbun sumur-sumur minyak itu dengan tanah karena Belanda tidak ingin bangsa Indonesia menggunakan dan menikmati hasil minyak dari sumur-sumur itu. Akhirnya dengan berbekal peta lama yang memuat denah dengan lokasi titik-titik sumur minyak, warga dengan bekerja secara berkelompok dan bersama-sama kemudian mencari, menggali, dan menambang sumur minyak itu. Penambangan minyak tradisional yang dilakukan oleh rakyat Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro tidak bisa lepas dari sejarah pertambangan Blok Cepu, sejak zaman Belanda pada tahun 1894.

b) Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pertambangan Ilegal di Wonocolo

1. Kondisi Geografis yang tidak mendukung

Gambar 2

Kondisi Bentang Alam di Wonocolo



Sumber : Dokumentasi Peneliti di Lapangan

Bentang alam Wonocolo yang berbentuk perbukitan kapur menjadi penghambat masyarakat untuk melakukan Pertanian. Tanah Desa Wonocolo adalah jenis tanah kapur kering. Tidak banyak tanah yang bisa digarap menjadi sawah yang dapat ditanami padi layaknya sawah di daerah Bojonegoro pada umumnya. Sehingga satu-satunya sumber mata pencaharian yang dapat diolah dan dinikmati hasilnya oleh masyarakat adalah sumur-sumur tua. masyarakat Desa Wonocolo dan sekitarnya sangat bergantung pada sumur minyak tua tersebut. Tanah kapur disebut juga dengan tanah mediteran, yakni salah satu jenis tanah yang tidak memiliki unsur hara, atau memiliki unsur hara namun hanya dalam jumlah yang sedikit sekali. Tanah kapur ini disebut juga dengan

tanah mediteran karena memiliki atri terbentuk dari bebatuan kapur yang telah lapuk dan hancur. Bebatuan kapur biasanya berwarna putih. Oleh karena itu tanah ini warnanya tidak hitam atau tidak gelap seperti tanah-tanah lainnya, namun memiliki warna lebih putih atau lebih terang dari tanah yang lainnya. Dalam artikel ini akan dijelaskan lebih detail dan lengkap mengenai tanah jenis ini.

Seperti jenis tanah yang lainnya, tanah kapur juga memiliki ciri- ciri tersendiri. Ciri- ciri dari tanah kapur beserta sifat fisik tanah antara lain adalah :

- 1). Tidak memiliki unsur hara, sehingga tanah jenis ini tidak subur

Ya, ciri pertama dan paling menonjol yang dimiliki oleh tanah kapur adalah bahwa tanah jenis ini merupakan jenis tanah yang tidak subur karena tidak memiliki unsur hara atau humus. Karena tanah ini tidak subur, maka tanah kapur ini tidak cocok digunakan sebagai lahan pertanian. Karena jika digunakan sebagai lahan pertanian, akan sangat sulit untuk mengembangkan tanaman tersebut. Meskipun tidak cocok digunakan sebagai lahan pertanian, namun tanah ini masih bisa berkontribusi dalam bidang pertanian.

- 2). Sangat mudah untuk dilalui air

Tanah kapur merupakan tanah yang bersifat sangat mudah dilalui oleh air. Maka dari itu jika kita terjun ke sungai, kita akan lebih sering menemukan jenis tanah di bawah aliran sungai tersebut adalah jenis tanah kapur.

3). Terbentuk dari pelapukan batuan kapur atau batu kapur yang sudah hancur

Tanah kapur ini merupakan jenis tanah yang terbentuk dari pelapukan batuan kapur atau terbentuk oleh batuan kapur yang sudah melapuk dan hancur. Oleh karena itu tanah kapur ini memiliki warna tanah yang terang dan tidak gelap warna tanah lainnya.

4). Tanah ini hanya berkontribusi sedikit dalam bidang pertanian

Tanah kapur ini merupakan tanah yang tidak subur karena tidak memiliki unsur hara atau humus. Namun, tanah ini masih dapat berkontribusi dalam bidang pertanian. Kontribusi tanah kapur ini tergolong penting karena digunakan untuk menurunkan tingkat keasaman pada tanah, sehingga akan diperoleh tanah yang netral.⁴²

Tanah sawah yang tidak luas mengakibatkan Masyarakat tidak memiliki pekerjaan sampingan selain menjadi Penambang minyak tradisional. Sawah sebagai penghasil bahan makanan pokok berupa beras seharusnya mampu menopang perekonomian masyarakat, namun struktur tanah didesa Wonocolo adalah tandus dan berkapur sehingga hanya cocok ditanami oleh pohon-pohon besar dan berkayu. Letak pemukiman yang dikelilingi oleh hutan pohon jati banyak membantu kehidupan masyarakat setempat, misalnya mereka dapat memanfaatkan daun-daun jati yang dijual sebagai bungkus ketika berbelanja, akar-akar pohon yang sudah mati (rencok) dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk memasak minyak mentah. Sehingga munculnya konflik

⁴² <https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/tanah/tanah-kapur> (diakses tanggal 01 April 2021, Pukul 08.30)

salah satu penyebabnya yakni konflik penguasaan lahan pertambangan minyak antara masyarakat yang merasa memiliki wilayah tambang yang berhadapan dengan penguasaan dibawah kelola KUD Bogosasono selaku mitra kerja PT. Pertamina EP Cepu.

2. Murahnya Harga minyak dari KUD dan PT BBS

Menurut Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 239 K/12/MEM/2020 Tentang Penetapan Harga Minyak Mentah Indonesia Bulan Noveber Harga rata-rata Minyak Mentah Indonesia untuk bulan November 2020 ditetapkan sebesar US\$ 40.67/barrel. Ditinjau dari aspek hukum Normative, eksplorasi yang dilakukan oleh kelompok penambang dan penyuling sejak dari pengangkutan minyak mentah, proses penambangan, penyulingan, penyimpanan hingga menjual minyak mentah, merupakan kegiatan yang diklasifikasikan sebagai illegal transportation, illegal refinery dan illegal sales. Peraturan perundangan yang terkait langsung yang dilanggar meliputi UUD 1945 Pasal 33 ayat 2 dan ayat 3; Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Bab III Pasal 3 butir 1; Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 9; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kualitas Air; dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua Pasal 2 ayat 2.

Menurut bapak Mugiono salah satu penambang di Wonocolo menyatakan, Harga yang dibayarkan dari KUD dan PT BBS pertahun 2019-2021 hanya pada kisaran Rp. 400.000 - Rp. 600.000,- per drum minyak mentah. Hal inilah yang mendapat reaksi protes dengan cara

menyuling minyak secara ilegal dan pemberhentian pasokan minyak mentah kepada Pertamina melalui KUD dan PT BBS selaku mitra kerja.

⁴³Sedangkan aktor yang terlibat dalam konflik, menurut subjek penelitian yakni seluruh penambang yang merasakan dampak dari rendahnya imbal jasa serta pihak KUD dan PT BBS. Sejak tahun 2005 kondisi mulai berubah karena masuknya orang-orang dari luar Desa Wonocolo yang membeli minyak mentah dari kelompok penambang dan kemudian mengolahnya sendiri dengan melakukan penyulingan untuk memperoleh hasil produk berupa solar.

Dari hasil kuisiner yang peneliti sebar ke para penambang. Permasalahan utama yang menyebabkan tidak bersedianya kelompok penambang menjual minyak mentahnya kepada KUD dan PT BBS adalah karena harga yang diberikan kepada kelompok penambang lebih rendah dibandingkan harga yang diberikan oleh kelompok pengepul.

Berdasarkan hasil Wawancara dengan Ibu Nunis Syukria. Beliau mengatakan untuk saat ini hanya PT BBS yang memiliki legalitas untuk mengelola sumur di Wonocolo. Beliau memaparkan BUMD melalui PT BBS merupakan salah satu solusi untuk menangani kegiatan pertambangan ilegal di Wonocolo. Dimana harga minyak yang ditawarkan PT BBS sudah mengikuti harga yang dikeluarkan oleh pemerintah akan tetapi para penambang masih belum cukup puas dan berinisiatif untuk mengelola hasil minyak mentah yang mereka tambang untuk menjadi solar melalui pengolahan yang seharusnya bukan kewenangan penambang. ⁴⁴Dari hasil kuisiner Kelompok penambang dan kelompok penyuling sebenarnya mengetahui dan menyadari sepenuhnya bahwa kegiatan yang mereka lakukan masuk dalam kategori melanggar hukum. Hal ini mereka ketahui dari konflik besar yang terjadi antara penambang dan KUD pada kurun waktu 2007-2013

⁴³ Hasil Wawancara mugiono, Jumat 16 April 2021, Pukul 12.00

⁴⁴ Hasil Wawancara Ibu Nunis Syukria. Senin 14 Juni 2021. Pukul 10.57 WIB

dimana sebenarnya sudah dilakukan sosialisasi dari pihak KUD akan tetapi tidak menemui titik terang hingga sekarang, karena para penambang masih memperlakukan harga minyak mentah yang murah dari KUD dan PT BBS mereka masih beranggapan harga minyak akan lebih mahal jika dilakukan penyulingan terlebih dahulu. Dimana harga minyak dari hasil penyulingan bias mereka jual sekitar Rp. 2000- Rp. 3000 per liter. Naik hingga 3 kali lipat dimana mereka bias mendapatkan Rp. 1.500.000- Rp. 2.000.000 per drum jika dijual dalam bentuk solar.

pengangkutan dan penjualan minyak mentah maupun solar hasil penyulingan ilegal harus kucing-kucingan untuk menghindari razia polisi. Berkaitan dengan permasalahan penambangan dan penyulingan minyak mentah yang dieksplorasi dari sumur tua di Desa Wonocolo yang dikategorikan sebagai kegiatan ilegal tersebut, studi ini bertujuan mencari usulan penyelesaian sengketa antara kelompok penambang dan KUD dan PT BBS selaku mitra PT. Pertamina EP. Cepu melalui cara-cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.⁴⁵

Seluruh subjek penelitian satu suara dan kompak bahwasanya isu konflik yang terjadi di Desa Wonocolo terkait imbal jasa yang diberikan pihak KUD dan PT BBS yang terlalu murah. Isu utama yang muncul memang karena imbal jasa yang dinilai terlalu murah bagi masyarakat karena tidak dapat menutup biaya operasional penambangan, bahkan malah merugi. Dengan demikian di Desa Wonocolo terdapat kelompok penambang, penambang sekaligus juga penyuling dan kelompok penyuling. Akibat kehadiran orang-orang luar tersebut, kelompok penambang tidak lagi menyetor minyak mentah ke KUD dan PT BBS, dengan alasan harga yang diberikan oleh orang luar lebih tinggi dari

⁴⁵ Suprpti, PENYELESAIAN SENGKETA PENGELOLAAN SUMUR TUA SECARA TRADISIONAL OLEH MASYARAKAT DI DESA WONOCOLO BOJONEGORO DITINJAU DARI ASPEK HUKUM, Jurnal Sosial Humaniora, Vol 4 No.2, 2011, hal 122-123.

harga yang ditetapkan oleh KUD dan PT BBS. Akhirnya KUD dan PT BBS menjadi tidak berperan dan sejak Nopember 2006 tidak ada lagi minyak mentah yang disetorkan ke PT. Pertamina EP. Cepu. Karena harga yang diberikan oleh Pertamina EP Cepu dinilai oleh warga sudah tidak sesuai lagi, maka banyak warga yang menyuling sendiri minyak mentah yang dihasilkannya. Dengan melakukan penyulingan sendiri, warga bisa mendapatkan pendapatan lebih tinggi.

3. Kondisi Ekonomi

Kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat ditolak di setiap negara. Hingga sekarang belum ada jalan keluar untuk menyelesaikan fenomena tersebut. Plato mengemukakan bahwa disetiap negara dimana banyak terdapat orang miskin, dengan secara diam-diam terdapat banyak penjahat, pelanggar agama dan dan penjahat dari bermacam-macam corak.⁴⁶ Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski melakukan kejahatan sekalipun. Orang-orang yang berada di kelas menengah ke bawah akan merasa hidupnya berbeda sekali dengan orang-orang yang memiliki pendapatan diatasnya, hal ini mendorong seseorang tersebut untuk melakukan kejahatan karena merasa iri.

Sejalan dengan pemikiran itu bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kejahatan di Wonocolo adalah masalah kemiskinan. Dalam kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.⁴⁷

⁴⁶ Ridwan Hasibuan, Ediwarman, Asas-Asas Kriminologi, Penerbit USU Press, Medan, 1995, hal 25

⁴⁷ Anang Priyanto, 2012, "Kriminologi", Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm 77

Tabel 4

Jumlah Penduduk Kerja (10 Tahun keatas)
menurut Jenis Usaha ditiap Desa

No.	Mata Pencanharian	Penduduk
1.	Karyawan/ABRI	15
2.	Tani	150
3.	Pedagang	37
4.	Pertambangan	200
5.	Buruh Tani	62
6.	Tukang	33
7.	Industri	15
8.	Buruh Harian	27
9.	Lain-lain	65
Jumlah Penduduk Kerja (10 Tahun keatas)		604

Sumber : Daftar Isian Tingkat Potensi dan Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan Wonocolo Tahun 2015

Hampir seluruh masyarakat di Desa Wonocolo bekerja dalam bidang pertambangan. Beberapa tahun yang lalu, kegiatan masyarakat hanya dipusatkan dalam bidang pertambangan. Kemudian seluruh hasil pertambangan diserahkan kepada KUD dan PT BBS disalurkan ke PT Pertamina kemudian diolah. Setelah lama, rupanya masyarakat mulai tidak sepakat dengan keputusan KUD dan PT BBS,Dengan demikian

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat cukup sulit, sehingga perlengkapan rumah tangga yang dimiliki pun tergolong sederhana. Hal yang diutamakan adalah bagaimana dapat mengisi perut untuk hari esok. Sampai saat ini masih banyak rumah-rumah yang masih beralaskan tanah. Dari data yang peneliti dapat dari hasil kuisioner di lapangan, para pekerja tambang hanya menghasilkan pendapatan Rp. 50.000 sampai Rp. 100.000 perhari. Itupun para penambang tidak mendapatkan pemasukan tersebut tiap hari. Karena hasil tambang tidak melulu dapat di setor tiap hari. Dimana biasanya harus menunggu 3 sampai 4 hari untuk mendapatkan 4 Drum minyak mentah yang siap dijual di Pengepul. Sisanya kekosongan jam kerja para penambang isi dengan bertani dan berkebun di lahan yang kurang subur. Dimana di daerah Wonocolo sebagian besar hanya dapat di tanami pisang dan jagung saja.

Berdasarkan hasil Wawancara Bapak Sutikno selaku ketua KUD, mengatakan masyarakat Wonocolo amat bergantung pada pertambangan. Pertambangan secara tradisional merupakan keahlian yang diwariskan turun temurun dari nenek moyang. dimana masyarakat khususnya Laki-laki yang tidak merantau di luar Wonocolo, sebagian besar memang bergantung pada pertambangan. adanya pertambangan tersebut berpengaruh pada kondisi pendidikan, social. Masyarakat akan sejahtera jika harga minyak lagi bagus dan bias dipergunakan untuk biaya hidup dan menyekolahkan anak-anaknya.⁴⁸

⁴⁸ Hasil wawancara Sutikno, Senin 11 April 2021 pukul 10.34

c) Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambahan Ilegal di Wonocolo

Penggunaan teori Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Pertambahan Ilegal di Wonocolo merupakan hal yang amat perlu untuk dikaji. Karena Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan. Definisi mengenai pertanggungjawaban pidana dikemukakan oleh Simon sebagai suatu keadaan psikis, sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut. Dasar adanya tanggungjawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut.⁴⁹

Menurut Simon, *strafbaar feit* adalah "kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab". Sedangkan menurut Van Hamel, "*strafbaar feit* adalah kelakuan orang yang bersifat melawan hukum dan dapat dipidana". Berangkat dari pendapat-pendapat tersebut maka dapat peneliti simpulkan bahwa *strafbaar feit* atau tindak pidana adalah suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang yang apabila dilanggar maka akan mendapatkan sanksi pidana.⁵⁰ Unsur tindak pidana dalam

⁴⁹ Sutan Remy Sjahdeini, "Pertanggungjawaban Pidana korporasi, Bandung, 2013, hal 56

⁵⁰ Moeljatno., *Op.Cit.* Hlm 63

ilmu hukum pidana disebut juga elemen delik (unsur delik). Elemen delik itu adalah bagian dari delik. Dalam penuntutan sebuah delik, harus dibuktikan semua elemen delik yang dituduhkan kepada pembuat delik.

Oleh karena itu jika salah satu unsur atau elemen delik tidak terpenuhi, maka pembuat delik tersebut tidak dapat dipersalahkan melakukan delik yang dituduhkan, sehingga pembuat delik harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslaag van rechts alle vervolging*). Elemen delik umumnya terbagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

- (1) unsur obyektif, atau yang biasa disebut *actus reus*, dan
- (2) unsur subyektif, atau yang biasa disebut *mens rea*.

Unsur Pertanggungjawaban adanya Tindak Pidana ini lebih spesifik memandang secara formil, karena undang-undang pidana melarang atau memerintahkan perbuatan itu disertai ancaman sanksi kepada barang siapa yang melanggar atau mengabaikannya. Arti perbuatan melawan hukum formil adalah unsur-unsur yang bersifat konstitutif, yang ada dalam setiap rumusan delik dalam aturan pidana tertulis, walaupun dalam kenyataannya tidak dituliskan dengan tugas bersifat melawan hukum. Dengan demikian dalam hal tidak dicantumkan berarti unsur melawan hukum diterima sebagai unsur *kenmerk* (diterima secara diam-diam, implicit). Melawan hukum formil lebih mementingkan kepastian hukum (*rechtszekerheids*) yang bersumber dari asas legalitas (*principle of legality, legaliteit benginsel*). Dalam penelitian ini Pertambangan Tanpa Izin di Wonocolo termasuk dalam Tindak Pidana Pelanggaran dimana secara luas kita ketahui Jenis Tindak Pidana Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrifven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III. Kejahatan dan pelanggaran dahulunya dibedakan secara kualitatif dimana suatu

perbuatan yang tanpa di atur di dalam undang-undang namun sudah di rasa mencederai norma-norma dalam masyarakat maka digolongkan menjadi kejahatan. Sedangkan perbuatan yang baru di sadari sebagai sebuah perbuatan yang mencederai norma-norma dalam masyarakat ketika perbuatan tersebut sudah di atur dalam undang-undang di golongankan menjadi pelanggaran.

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.⁵¹ Secara garis besar Pertanggungjawaban Pidana di Wonocolo termasuk dalam *Liability* Dimana Pertanggungjawaban pidana tersebut menitikberatkan kepada diteruskanya celaan objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat undang-undang untuk dapat dikenai pidana karena perbuatanya. Hal tersebut sama halnya menganut salah satu asas umum dala Hukum Pidana yaitu asas "tiada pidana tanpa kesalahan", Di mana pikiran-pikiran untuk memisahkan tindak pidana dari

⁵¹ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 335-337

pertanggungjawaban pidana⁵² dan kesalahan merupakan dasar untuk menentukan pertanggungjawaban pidana.⁵³

Secara umum Tindak Pidana yang dilakukan pelaku Penambangan ilegal di Wonocolo meliputi usaha Hulu maupun Hilir. Kegiatan Usaha Hulu di Wonocolo adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi. Sedangkan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga. Ditinjau dari asas legalitas, penambangan dan dijual kepada pihak lain untuk kepentingan individu adalah melanggar peraturan perundangan yang berlaku. Hal tersebut berhubungan dengan Unsur Pertanggungjawaban, yang merupakan bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, pendapat Jonker, beliau menganut paham monisme dalam hukum pidana. Sehingga unsur yang beliau paparkan mengenai tindak pidana juga pertanggung jawaban pidana. Unsur Rumusan Tindak Pidana Dalam Undang-undang Unsur-unsur tindak pidana dalam undang-undang terdiri atas unsur obyektif dan unsur subyektif. Dimana unsur obyektif menitik beratkan pada unsur-unsur yang berada di luar diri pelaku. Sedangkan unsur subyektif menitik beratkan pada unsur-unsur yang berada di dalam diri pelaku. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, ialah mengenai tingkah laku/perbuatan Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan seringkali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan adalah mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab. Disamping itu banyak mencantumkan unsur-unsur

⁵² Andi Hamzah. Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2014), hlm. 98.

⁵³ Agus Rusianto SH.MH „/“ Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban pidana” , PT.fajar Interpratama Mandiri, 2016, Hlm.236

lain baik sekitar/mengenai obyek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu. Sedangkan Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, maka dapat diketahui adanya

11 unsur tindak pidana, yaitu:

- a). Tingkah laku.
- b). Unsur melawan hukum.
- c). Unsur kesalahan.
- d). Unsur akibat konstitutif.
- e). Unsur keadaan yang menyertai.
- f). Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
- g). Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.
- h). Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.
- i). Unsur objek hukum tindak pidana.
- j). Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k). Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.⁵⁴

Dari 11 unsur itu, diantaranya dua unsur yakni kesalahan dan melawan hukum adalah termasuk unsur subyektif, sedangkan selebihnya adalah berupa unsur obyektif. kesalahan dikeluarkan dari unsur tindak pidana dan ditempatkan sebagai faktor yang menentukan dalam pertanggungjawaban pidana. Namun demikian, bagaimana konsep ini diterapkan dalam praktik hukum perlu elaborasi yang lebih mendalam. Di satu sisi, pertanggungjawaban pidana terutama dipandang sebagai bagian dari implementasi tugas hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang ada padanya. Oleh sebab itu, hal pertama dalam mengelaborasi mengenai teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, dengan menelusuri penerapan dan perkembangannya dalam praktek tugas hakim dalam menjatuhkan putusan.

⁵⁴ Adami Chazawi, *Op.,Cit*, hlm. 82

Sebenarnya pemerintah sendiri sudah mengatur proses perizinan Pertambangan minyak bumi baik dari segi Perizinan usaha Hulu maupun usaha Hilir, yang mana hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Suber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Suber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017, Dimana syarat yang dibutuhkan untuk melengkapi perizinan tersebut. Syarat perizinan migas sendiri terdiri dari dua jenis:

1. Perizinan Administrasi
2. Perizinan Teknis

Kedua hal tersebut tentunya disesuaikan dengan pengajuan perizinan migas dari pelaku kegiatan usaha dan akan dievaluasi langsung oleh Direktur Jenderal sebelum menerbitkan surat rekomendasi kepada Menteri, terkait dengan perizinan yang diajukan. Peraturan Menteri Energi dan Suber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Suber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 29 TAHUN 2017 Tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi, yang termuat pada Pasal 4 berbunyi:

Ayat (1) Izin survei sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a meliputi kegiatan:

- Survei Umum Minyak dan Gas Bumi Konvensional.
- a. Survei Umum Migas Non Konvensional.
- b. Survei ke luar Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Konvensional.
- c. Survei ke luar Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Non-Konvensional

Ayat (2) Izin Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b antara lain meliputi kegiatan:

- a. Pemanfaatan data hasil kegiatan Survei Umum, studi bersama, eksplorasi, dan eksploitasi, untuk tujuan evaluasi dan pengolahan data di dalam negeri atau luar negeri.
- b. Pemanfaatan data hasil kegiatan Survei Umum, studi bersama, eksplorasi, dan eksploitasi untuk tujuan ilmiah di dalam negeri atau luar negeri.
- c. Pemanfaatan data hasil kegiatan eksplorasi, dan eksploitasi untuk tujuan pembukaan data (disclosed data) dalam rangka pengalihan interest, termasuk pembukaan data secara virtual.

Ayat (3) Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi kegiatan:

- a. pengolahan Minyak Bumi
- b. pengolahan Gas Bumi
- c. pengolahan Hasil Olahan
- d. dihapus.

Ayat (4) Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi kegiatan:

- a. penyimpanan Minyak Bumi
- b. penyimpanan Bahan Bakar Minyak
- c. penyimpanan LPG, LNG, CNG, atau BBG
- d. penyimpanan Hasil Olahan.

Ayat (5) Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi kegiatan usaha:

- a. Pengangkutan Minyak Bumi.
 - b. Pengangkutan Bahan Bakar Minyak.
 - c. Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa.
 - d. Pengangkutan LPG, LNG, CNG, atau BBG.
 - e. Pengangkutan Hasil Olahan.
6. Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f meliputi kegiatan:
- a. Niaga Minyak Bumi.
 - b. Niaga Umum Bahan Bakar Minyak.
 - c. Niaga Terbatas Bahan Bakar Minyak.
 - d. Niaga Umum Hasil Olahan.
 - e. Niaga Terbatas Hasil Olahan.
 - f. Niaga Gas Bumi melalui pipa.
 - g. Niaga Gas Bumi yang memiliki fasilitas jaringan distribusi.
 - h. Niaga LPG, LNG, CNG atau BBG.

Berdasarkan keterangan dan informasi dari pihak-pihak terkait, mulai dari warga pengelola sumur, kades sampai pemda (bagian sumberdaya alam) maka penulis mendapatkan fakta bahwa seluruh pertambangan rakyat di desa Wonocolo tidak didaftarkan secara resmi kepada pihak yang berwenang, kecuali izin lisan sampai ketinggian Kabupaten.⁵⁵

Menurut penulis, dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum, maka setiap tindakan atau usaha (dalam hal ini kegiatan ekonomi) yang tidak memenuhi ketentuan hukum

⁵⁵ Hasil Wawancara Kepala Desa Bapak Jasmin, Jumat 16 April 2021 pukul 08.00

yang telah ada, maka hal tersebut dianggap menyimpang dan merupakan sebuah pelanggaran. Meskipun izin lisan sampai pada tingkat kabupaten telah didapatkan warga, tapi hal tersebut tidak mempunyai kekuatan di depan hukum selama tidak ada surat izin resmi (*hitam di atas putih*) yang menyatakan legalitas kegiatan penambangan mereka.

Sesuai dengan ketentuan hukum positif dalam hal pertambangan rakyat, maka setidaknya kegiatan ini harus didaftarkan sehingga sah dan legal, serta mempunyai SIPR (Surat Izin Pertambangan Rakyat) yaitu, bentuk perizinan pertambangan yang harus dimiliki seseorang atau kelompok warga, untuk mengusahakan bahan galian golongan A, B dan C, (*kasus di Wonocolo adalah bahan Galian Golongan A, yaitu minyak bumi*) oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan dengan alat-alat yang sederhana untuk mata pencaharian sendiri

(1) SIPR ini diberikan kepada perseorangan atau koperasi. Dahulu, surat izin ini dikeluarkan oleh Gubernur (Kepala Daerah Tingkat I) setelah mendapat persetujuan Menteri Pertambangan dan Energi. Kasus di Wonocolo adalah koperasi Bogosasono. Dan hal tersebut sesuai dengan ada Peraturan menetri ESDM Nomor 1 tahun 2008 Tentang Pengusahaan Sumur Tua , BAB I, pasal 2ayat 1, 2 dan 3. *Kontraktor mempunyai kewajiban untuk mengusahakan dan memproduksi Minyak Bumi dari Sumur Tua yang masih terdapat kandungan Minyak Bumi berdasarkan pertimbangan teknis dan ekonomis*

(2) *Dalam ha1 Kontraktor tidak mengusahakan dan memproduksi Minyak Bumi dari Sumur Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KUD atau BUMD dapat mengusahakan dan memproduksi Minyak Bumi setelah mendapat persetujuan Menteri*

(3) *Pengusahaan dan pemroduksian Minyak Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan KUD atau BUMD berdasarkan Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi dengan Kontraktor.*

Di samping itu pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, Pasal 47ayat (1) dan (2) juga disebutkan bahwa:

1) *IPR (Izin Pertambangan Rakyat diberikan oleh bupati/walikota berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penduduk setempat, baik orang perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.*

2) *IPR diberikan setelah ditetapkan WPR oleh bupati/walikota.*⁵⁶

Sudah adanya peraturan yang mengatur secara jelas dalam Proses Usaha Hulu dan Hilir, Pertambangan minyak di Wonocolo, tidak bisa menjadi jaminan bagi para Penambang untuk mengikuti prosedur yang telah diatur dalam Undang-Undang. Sulitnya Perizinan dan Konflik harga antara Penambang dan pihak terkait, merupakan hal yang menjadi dasar utama para Penambang untuk melakukan kegiatan usaha Hulu

⁵⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia: Pertambangan Mineral dan Batubara*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2010), hal. 162

dan Hilir di Wonocolo secara illegal, karena mereka beranggapan hal tersebut lebih menguntungkan secara financial bagi para pelaku.

Dalam hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana "tidak dipidana jika tidak ada kesalahan". Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menurut Barda Nawawi Arief,⁵⁷ bahwa tindak pidana hanya membahas perbuatan secara objektif, sedangkan hal-hal yang bersifat subjektif terkait dengan sikap batin pembuat tindak pidana harus dikeluarkan dari pengertian tindak pidana, karena sikap batin pembuat termasuk dalam lingkup kesalahan dan pertanggungjawaban pidana yang menjadi dasar etik "*the act constituting a crime may in some circumstances be objectively innocent*"⁵⁸ Dari sini terlihat perbedaan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya berorientasi pada perbuatan yang dilarang berdasarkan norma hukum, sedangkan pertanggungjawaban pidana menunjuk kepada sikap-sikap subjektif yang didasarkan kepada kewajiban hukum seseorang untuk mematuhi hukum.⁵⁹ Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan ditambah dengan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Lebih jelasnya Penulis menyimpulkan dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidanya pembuat adalah asas kesalahan. Hal ini mengandung arti bahwa pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana apabila jika dia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana dan untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

Pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus diperhatikan dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana. Soalnya apakah pertanggungjawaban itu diminta atau tidak yang terpenting adalah pada kebijakan pihak yang berkepentingan untuk

⁵⁷ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013)

⁵⁸ Glanville William, *Criminal Law: General Part* (London: Stevens & Sons, 1961), hlm. 22

⁵⁹ Roeslan Saleh, *Masih Saja tentang Kesalahan* (Jakarta: Karya Dunia Fikir, 1994), hlm. 81-82.

memutuskan apakah merasa perlu atau tidak menurut pertanggungjawaban tersebut. Masalah ini menyangkut subjek tindak pidana yang pada umumnya oleh si pembuat undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan. Namun dalam kenyataannya, tidaklah mudah untuk memastikan siapakah si pembuatnya karena untuk menentukan siapa yang bersalah harus sesuai dengan proses yang ada yaitu sistem peradilan pidana. Dengan demikian tanggung jawab tersebut selalu ada, meskipun belum pernah dituntut oleh pihak yang berkepentingan, jika pelaksanaan peranan yang telah berjalan itu ternyata tidak mencapai tujuan atau persyaratan yang diinginkan. Demikian pula halnya dengan masalah terjadinya perbuatan pidana atau delik, suatu tindakan yang telah melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidaknya oleh undang-undang yang telah dinyatakan sebagai perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum. Suatu perbuatan yang melawan hukum belumlah cukup untuk menjatuhkan hukuman di samping kelakuan melawan hukum harus ada seorang pembuat (dader) yang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Dengan demikian untuk menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku Tindak Pidana Pertambangan Ilegal di Wonocolo yang fakta di lapangan terbagi jenis tindak pidana, Mengenai Tindak Pidana Eksploitasi tercantum dalam Pasal 52, Tindak Pidana Pengolahan Minyak dan Gas Bumi Tanpa Surat Izin Usaha tercantum dalam Pasal 53 huruf a, Tindak Pidana Pengangkutan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi Tanpa Izin Usaha tercantum pada Pasal 53 huruf b, Tindak Pidana Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi Tanpa Izin Usaha tercantum dalam Pasal 53 huruf c, Tindak Pidana Niaga Tanpa Surat Izin tercantu dalam Pasal 53 huruf d,

Berdasarkan pendapat di atas, dapat diketahui bahwa pelaku dapat dipertanggungjawabkan secara hukum jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Ada pelaku tindak pidana (baik orang maupun badan hukum).
2. Ada perbuatan (baik aktif maupun pasif).
3. Ada kesalahan (baik sengaja maupun culpa).
4. Mampu bertanggung jawab (tidak ada alasan pemaaf dan tidak ada alasan pembenar).
5. Bersifat melawan hukum (sesuai dengan azas legalitas).

Secara rinci dapat dikemukakan unsur-unsur tindak pidana Pelaku Pertambangan Ilegal di Wonocolo sebagai berikut:

1. Unsur Pertanggungjawaban Pidana Adanya Pelaku tindak pidana (baik orang maupun badan hukum)

Yang dimaksud setiap orang atau diartikan sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana. Dalam KUHP hanya dikenal subjek hukum berupa orang atau manusia, tidak dikenal subjek hukum berupa badan hukum, seperti korporasi, perkumpulan, perusahaan, koperasi, yayasan, dan lain-lain. Oleh karena itu, subjek hukum dalam Tindak Pidana Pertambangan Ilegal di Wonocolo yang fakta di lapangan terbagi jenis tindak pidana, Mengenai Tindak Pidana Eksploitasi tercantum dalam Pasal 52, Tindak Pidana Pengolahan Minyak dan Gas Bumi Tanpa Surat Izin Usaha tercantum dalam Pasal 53 huruf a, Tindak Pidana Pengangkutan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi Tanpa Izin Usaha tercantum pada Pasal 53 huruf b, Tindak Pidana Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi Tanpa Izin Usaha tercantum dalam Pasal 53 huruf c, Tindak Pidana Niaga Tanpa Surat Izin tercantu dalam Pasal 53 huruf d.

Secara khusus segala kegiatan Hulu dan Hilir yang dilakukan pelaku pertambangan Ilegal di Wonocolo ada beberapa Tindak Pidana yang dilakukan oleh para penambang yaitu dalam proses Eksplorasi, Eksploitasi dan Tindak Pidana Pengolahan Minyak dan Gas Bumi Tanpa Surat Izin Usaha yang diatur Pasal 52 dan Pasal 53 huruf a - Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Adapun bunyi pasal, penjelasan dan unsur-unsur adanya Pelaku Tindak Pidana dalam Pasal tersebut meliputi :

- a). Eksplorasi dan Eksploitasi Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

Pada tahun 1986 penambangan minyak di Desa Wonocolo diserahkan sepenuhnya kepada penambang dengan ditandatanganinya perjanjian kerjasama antara Pertamina dengan para penambang tradisional, tujuannya adalah meningkatkan produksi dengan mengusahakan sumur yang tidak ekonomis bila diproduksi dan diganti dengan cara timba yang lebih murah. Saat ini tidak semua sumur-sumur yang dikelola masyarakat itu mempunyai surat ijin resmi, hanya sebagian mempunyai surat ijin. dahulu memang hampir semua sumur merupakan sumur legal yang memiliki ijin resmi yang dimiliki masyarakat dengan bekerjasama dengan KUD,

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Ratib, merupakan penjaga museum di Wonocolo. Mengatakan Sebenarnya legal,

dahulu ada serah terima dari pak menteri, sekitar 1992 namun untuk saat ini tidak semua sumur memiliki surat ijin, hal tersebut dikarenakan banyak sumur baru yang digali masyarakat tanpa meminta ijin kepada Desa, system pembuatan sumur yang hanya disepakati kelompok, setelah kelompok menyepakati penggalian sumur akan dilakukan. Sumur galian baru biasanya ada disamping sumur-sumur yang telah ada, tidak semua penggalian sumur minyak berhasil dilakukan, kadang ada yang gagal setelah digali ternyata tidak ada minyaknya, lalu dilakukan penggalian lain disamping sumur lama dan terus dilakuakn seperti itu. Sehingga sekarang jumlah sumur yang ada membeludak hingga kurang lebih 720 sumur dari 220 sumur peninggalan Belanda.⁶⁰

Gambar 3

Salah satu Sumur Galian Baru di Wonocolo



Sumber : Dokumentasi Peneliti di Lapangan

Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan unsur setiap orang dalam proses Eksplorasi dan Eksploitasi pada penelitian ini adalah para Pelaku Penambang Ilegal di Wonocolo yang melakukan penggalian sumur baru, baik perseorangan maupun yang dilakukan secara berkelompok

⁶⁰ Hasil wawancara Ratib, Selasa 08 Desember 2020 pukul 13.15

tanpa melakukan perizinan ke pihak desa dan KUD selaku mitra pihak Pertamina.

b). Pengolahan Pasal 53 huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

Dari hasil para Penambang di Wonocolo yang mana Hasil pertambangan ini berupa minyak mentah tidak berhenti diproses penambangan saja, untuk menjadikan produk siap pakai seperti, solar dan minyak tanah masih harus melalui proses destilasi minyak mentah diolah dengan menggunakan teknologi yang ada sehingga menghasilkan minyak tanah dan solar siap konsumsi untuk kendaraan, seperti yang diungkapkan oleh Mugiono selaku penambang tradisional di Desa Wonocolo, ia mengatakan "Disini itu menggunakan proses sendiri yang didapat dari hasil pembicaraan dengan warga yang lain, penambangan tradisional disini tidak sama dengan penambangan yang dilakukan oleh Pertamina, penambangan disini menggunakan proses manual, masyarakat sini lebih memilih menjadi penambang tradisional daripada kerja disawah"⁶¹

Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan unsur setiap orang dalam proses Pengolahan pada penelitian ini adalah para Pelaku Penambang Ilegal di Wonocolo yang melakukan pengolahan minyak mentah sumur galian baru maupun galian lama melalui proses destilasi minyak mentah diolah dengan menggunakan teknologi yang ada sehingga menghasilkan minyak tanah dan solar siap konsumsi untuk kendaraan. Setiap orang dalam Pengolahan Pasal 53 a ini adalah perseorangan maupun yang dilakukan secara berkelompok tanpa melakukan perizinan Pengolahan Pasal 3 huruf c Peraturan Menteri Energi dan Suber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Suber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017.

c). Pengangkutan Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

Pengangkutan minyak di Wonocolo dilakukan dengan cara manual dimana kegiatan tersebut dilakukan tanpa menggunakan pipa transmisi dan distribusi seperti halnya yang dilakukan oleh Pertamina. Kegiatan

⁶¹ Hasil wawancara Mugiono, minggu 11 April 2021 pukul 11.45

tersebut dilakukan Setiap seminggu sekali mobil tangki Pertamina akan mengambil satu persatu hasil penambangan milik warga yang akan dijual kepada Pertamina, biasanya warga juga mengantarkannya ke pihak Pertamina dengan menggunakan Bull (wadah kotak minyak yang berisi 1000 Liter). Minyak yang disetor ke Pertamina hanya sebagian kecil dari hasil penambangan, hal itu mereka anggap untuk formalitas belaka. Hasil minyak dari penambangan dan pengolahan minyak secara tradisional disalurkan dari pengecer ke pengepul dan dari pengepul ke pangkalan-pangkalan yang diambil secara langsung oleh orang perorang dengan menggunakan jerigen-jerigen dan mereka mengangkutnya menggunakan sepeda motor yang bisa mengangkut 4-5 jerigen.

Gambar 4

Pengangkutan Minyak secara manual menggunakan sepeda motor



Sumber : Dokumentasi Peneliti di Lapangan

Pengguna atau konsumen dari hasil penambangan adalah kalangan atau rekan-rekan penambang sendiri. Termasuk para sopir bus dan truk yang sudah mereka kenal, Petani, dan Nelayan.

Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan unsur setiap orang dalam proses Pengangkutan pada penelitian ini adalah para Pelaku Penambang Ilegal di Wonocolo yang melakukan pengangkutan minyak mentah maupun minyak yang sudah di destilasi menjadi bensin, minyak

tanah, dan solar, meliputi orang perorang yang melakukan pengangkutan menggunakan jerigen-jerigen dan para sopir bus dan truk yang bekerja sama dengan para penambang. Setiap orang dalam Pengangkutan Pasal 53 b ini adalah perseorangan maupun yang dilakukan secara berkelompok tanpa melakukan perizinan Pengolahan Pasal 3 huruf e Peraturan Menteri Energi dan Suber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Suber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017.

d). Penyimpanan Pasal 53 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

Minyak yang disetor ke Pertamina hanya sebagian kecil dari hasil penambangan, hal itu mereka anggap untuk formalitas belaka. Hasil minyak dari penambangan dan pengolahan minyak secara tradisional disalurkan dari pengecer ke pengepul dan dari pengepul ke pangkalan pangkalan yang diambil secara langsung oleh orang perorang dengan menggunakan jerigen-jerigen.

Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan unsur setiap orang dalam proses Penyimpanan pada penelitian ini adalah para Pelaku Penambang Ilegal di Wonocolo yang melakukan penyimpanan minyak mentah maupun minyak yang sudah di destilasi menjadi bensin, minyak tanah, dan solar, meliputi orang perorang yang melakukan penyimpanan dari pihak penambang, pengepul, dan pengecer. Setiap orang dalam Pengangkutan Pasal 53 c ini adalah perseorangan maupun yang dilakukan secara berkelompok tanpa melakukan perizinan Penyimpanan Pasal 3 huruf e Peraturan Menteri Energi dan Suber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Suber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017.

Gambar 5

Jerigen Penyimpanan sementara sebelum di setor ke pengecer dan pengepul



Sumber : Dokumentasi Peneliti di Lapangan

e). Niaga Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

Hasil dari penambangan minyak bumi masyarakat Wonocolo sebagian yang dijual di Pertamina dan ada yang dijual langsung pada pengecer atau pengepul. Hasil minyak yang dijual ke Pertamina kemudian akan diolah lagi oleh Pertamina untuk meningkatkan kualitas hasil pengolahan penambangan secara tradisional.

Menurut bapak Tegar salah satu Pemilik Sumur Tradisional di Wonocolo. Dari hasil wawancara Peneliti mengungkapkan, Setiap harinya rata-rata sumur minyak bumi tradisional mampu menghasilkan sekitar 2 Drum hasil tersebut akan dikumpulkan dan setelah seminggu akan dijual. Minyak mentah dihargai 600 ribu/drum (berisi 250 liter minyak) setelah diolah menjadi bensin solar dan minyak tanah harga bisa mencapai 900 ribu/drum. Biasanya penambang menjual dengan ukuran kotak minyak besar ukuran 1000 liter, dengan harga mencapai Rp. 2.400.000 per kotak besar ukuran 1000liter. Sebagian besar minyak yang sudah jadi dipasarkan ke para Nelayan dan petani untuk kebutuhan diesel kapal nelayan dan diesel untuk pengairan petani.⁶²

⁶² Hasil wawancara Tegar, Sabtu 10 April 2021 pukul 10.34

Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan unsur setiap orang dalam proses Niaga pada penelitian ini adalah para Pelaku Penambang Ilegal di Wonocolo yang melakukan Niaga/Penjualan, Pembeli langsung, dan Pengepul, baik berupa minyak mentah maupun minyak yang sudah di destilasi menjadi bensin, minyak tanah, dan solar, Setiap orang dalam Pengangkutan Pasal 53 d ini adalah perseorangan maupun yang dilakukan secara berkelompok tanpa melakukan perizinan Penyimpanan Pasal 3 huruf f Peraturan Menteri Energi dan Suber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Suber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017.

2. Unsur Pertanggungjawaban Pidana Adanya perbuatan (baik aktif maupun pasif)

Moeljatno mengatak⁶³ an bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tertentu. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelalaian orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dalam hukum pidana Indonesia menghendaki perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak kelaur, karena didalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang, hal ini asas *cogitationis poenam nemo patitur*, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja.⁶⁴

Gambar 6

Proses Pengeboran menggunakan mesin tradisional

⁶³ Moeljatno, op.cit, h. 59.

⁶⁴ Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm-85



Sumber : Dokumentasi Peneliti di Lapangan

Menurut salah satu Penambang Bapak Wiranto sudah bekerja di Wonocolo ini sekitar 4 tahunan. Setelah bekerja di minyak tradisional ekonomi pak wiranto mengalami peningkatan, Sebelumnya dia hanya menganggur dan setelah diajak temannya dia bekerja di minyak tradisional ini sebagai penarik tali dengan mesin diesel. pekerjaan pak Wiranto termasuk santai dari temannya lainnya, karena pak Wiranto hanya menjalankan mesin diesel sambil duduk dan mengawasi agak jauh dari sumur minyak. bayaran yang di dapatkan juga lebih besar dari beberapa temannya lainnya. ketika pendapatan minyak yang didapatkan banyak seminggu bisa mencapai 2 ton dalam satu sumur, dan hasil uang yang di dapatkan bisa mencapai hasil 20 juta.⁶⁵

Hasil produksi berupa minyak tanah dan solar yang siap di distribusikan ke semua daerah sesuai permintaan, karena produk minyak bumi yang telah diolah menjadi solar, bensin dan minyak tanah yang terjual harganya relatif rendah, sehingga para pengecer/penjual, petani, nelayan dan industri yang tidak mampu membeli solar non subsidi bernafas lega dan menjadi konsumen utama. Setiap harinya rata-rata sumur minyak bumi tradisional mampu menghasilkan sekitar 2 Drum hasil tersebut akan dikumpulkan dan setelah seminggu akan dijual. Minyak mentah dihargai 600 ribu/drum (berisi 250 liter minyak) setelah diolah menjadi bensin solar dan minyak tanah harga bisa mencapai 900 ribu/drum. Biasanya penambang menjual dengan ukuran kotak minyak besar ukuran 1000 liter, dengan harga mencapai Rp. 2.400.000 per kotak besar ukuran 1000liter.

Dari segala Perbuatan yang dilakukan oleh penambang ini adalah salah satu perbuatan aktif. Tindak pidana aktif (comissionis) adalah tindak pidana yang berupa perbuatan aktif. Yang mana dimaksud perbuatan aktif pada penelitian ini

⁶⁵ Hasil wawancara Wiranto, Sabtu 10 April 2021 pukul 08.00

adalah kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan Niaga Minyak dan Gas Bumi Tanpa Surat Izin Usaha yang diatur Pasal 52 dan Pasal 53 huruf a - Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Perbuatan aktif adalah suatu perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Sedangkan Tindak pidana pasif (omisionis) adalah tindak pidana yang berupa tidak berbuat sesuatu. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum.

3. Unsur Pertanggungjawaban Pidana Adanya kesalahan (baik sengaja maupun culpa)

Pembuktian Unsur Pertanggungjawaban Pidana Adanya kesalahan pada penelitian ini peneliti berpandangan pada aliran dualistik, Dengan demikian pandangan ahli hukum yang beraliran dualistik ini ada pemisahan antara criminal act dan criminal responsibility, dimana Syarat formil itu harus ada karena keberadaan asas Legalitas yang tersimpan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Syarat materiil pun harus ada pula, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, oleh karena itu bertentangan dengan atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.⁶⁶

Dala penelitian ini Faktor ekonomi memang menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi masyarakat Wonocolo melakukan penambangan minyak bumi tradisonal secara ilegal. Mereka tidak punya pilihan lain, selain itu ada faktor penarik yang mnjadi faktor penambangan yaitu masyarakat melihat adanya peluang besar dalam melakukan penambngan minyak tersebut. Sejak sumur-sumur tersebut ditinggalkan oleh belanda dan diserahkan pemerintah untuk diolah KUD, hampir seluruh masyarakat ikut merasakan emas hitam di desa mereka, meski tidak semua pemilik sumur tersebut adalah orang sekitar Wonocolo sendiri.

Pandangan yang memisahkan tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana, yaitu unsur utama dari pertanggungjawaban pidana hanyalah unsur kesalahan, dan kesalahan bukan sebagai unsur dari tindak pidana ini dikenal sebagai teori/asas dualistik. Ahli hukum pidana yang pertama kali yang mengemukakan teori dualistik adalah Herman Kantorowicz, seorang sarjana hukum pidana Jerman yang menulis buku yang berjudul Tut und Schuld pada

⁶⁶ Sudarto, op.cit, h. 27

tahun 1933.⁶⁷ Dasar untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan bertolak dari asas legalitas formal, namun demikian juga memberi tempat kepada hukum yang hidup/hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum, rambu-rambunya yaitu sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa (nilai-nilai nasional dan internasional). Sesuai dengan nilai-nilai nasional yaitu Pancasila. Artinya sesuai dengan nilai paradigma moral religius, nilai kemanusiaan, kebangsaan, demokrasi, dan nilai-nilai keadilan sosial. Sedangkan nilai-nilai internasional adalah mengacu/bersumber dari istilah "the general principle of law recognized by the community of nation" yang terdapat pada pasal 15 ayat (2) ICCPR. (International Covenant on Civil and Political Right).

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya. Pengertian kesalahan di sini digunakan dalam arti luas. Dalam KUHP kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda yang berada dalam pasal 359 dan 360. Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi maupun dalam arti normative. Kesalahan psikologis adalah kejahatan yang sesungguhnya dari seseorang, kesalahan psikologis ini adalah kesalahan yang ada dalam diri seseorang, kesalahan mengenai apa yang orang itu pikirkan dan hatinya rasakan, kesalahan psikologis ini sulit untuk dibuktikan karena bentuknya tidak real, kesalahan psikologis susah dibuktikan karena wujudnya tidak dapat diketahui.

a) Kesengajaan

Dalam penelitian ini dari pengamatan peneliti unsur kesengajaan adalah unsur utama yang dilakukan penambang dalam melakukan Tindak Pidana Pertambangan illegal. Hal ini memang dilakukan karena desakan ekonomi, kondisi geografis yang tidak mendukung untuk pekerjaan lain, dan murah harga minyak jika dijual ke pihak KUD. kebanyakan unsur kesengajaan atau *opzettelijk* bukan unsur *culpa*. Hal ini berkaitan bahwa orang yang lebih pantas mendapatkan hukuman adalah orang yang

⁶⁷ Muladi, Dwidja Priyatno. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 64.

melakukan hal tersebut atau melakukan tindak pidana dengan unsur kesengajaan. Mengenai unsur kesalahan yang disengaja ini tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui bahwa perbuatannya diancam oleh undang-undang, sehingga tidak perlu dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang bersifat "jahat". Sudah cukup dengan membuktikan bahwa pelaku menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui konsekuensi atas perbuatannya. Hal ini sejalan dengan adagium fiksi, yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui isi undang-undang, sehingga dianggap bahwa seseorang mengetahui tentang hukum, karena seseorang tidak dapat menghindari aturan hukum dengan alasan tidak mengetahui hukum atau tidak mengetahui bahwa hal itu dilarang. Kesengajaan telah berkembang dalam yurisprudensi dan doktrin sehingga umumnya telah diterima beberapa bentuk kesengajaan, yaitu :⁶⁸

1). Sengaja sebagai maksud

Sengaja sebagai maksud dalam kejahatan bentuk ini pelaku benar-benar menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) atas perbuatan dan akibat dari perbuatan yang pelaku perbuat.⁶⁹ Hal mengetahui dan menghendaki ini harus dilihat dari sudut pandang kesalahan normative, yaitu berdasarkan peristiwa-peristiwa konkret orang-orang akan menilai apakah perbuatan tersebut memang dikehendaki dan diketahui oleh

pelakunya. Kesalahan dengan kesengajaan sebagai maksud sipelaku dapat dipertanggungjawabkan, kesengajaan sebagai maksud ini adalah bentuk yang mudah dimengerti oleh khalayak masyarakat. Apabila kesengajaan dengan maksud ini ada pada suatu tindak pidana dimana tidak ada yang menyangkal maka pelaku pantas dikenakan hukuman pidana yang lebih berat apabila dapat dibuktikan bahwa dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku benar benar

⁶⁸ *Ibid*, hlm-121 *Ibid*,

⁶⁹ *Ibid*, hlm-122

suatu perbuatan yang disengaja dengan maksud, dapat dikatakan sipelaku benar-benar menghendaki dan ingin mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana.

2). Sengaja sebagai suatu keharusan

Kesangajaan semacam ini terjadi apabila sipelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat dari perbuatannya, tetapi ia melakukan perbuatan itu sebagai keharusan untuk mencapai tujuan yang lain. Artinya kesangajaan dalam bentuk ini, pelaku menyadari perbuatan yang ia kehendaki namun pelaku tidak menghendaki akibat dari perbuatan yang telah ia perbuat.

3). Sengaja Sebagai kemungkinan

Dalam sengaja sebagai kemungkinan, pelaku sebenarnya tidak menghendaki akibat perbuatannya itu, tetapi pelaku sebelumnya telah mengetahui bahwa akibat itu kemungkinan juga dapat terjadi, namun pelaku tetap melakukan perbuatannya dengan mengambil resiko tersebut.

Sebagaimana hasil wawancara saya dengan bapak Wiranto Lalu alasan masyarakat tidak mengolah dengan cara modern juga karena alasan biaya penambangan dengan alat modern seperti milik Pertamina pasti akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, dan biasanya sumur-sumur tradisional yang dikelola warga itu sumur yang kandungan minyaknya tidak terlalu banyak. Berbeda dengan sumur-sumur yang dikelola Pertamina, Pertamina tidak akan mengelola sumur jika produksi sumur tersebut kecil. Karena jika hasil yang di dapatkan sedikit tidak akan mengimbangi biaya operasional yang menggunakan mesin dan alat-alat berat milik Pertamina. Begitu juga tanah Desa Wonocolo adalah jenis tanah kering. Tidak banyak tanah yang bisa digarap menjadi sawah yang dapat ditanami padi layaknya sawah di daerah Bojonegoro pada umumnya. Sehingga satu-satunya sumber mata pencaharian yang dapat

diolah dan dinikmati hasilnya oleh masyarakat adalah sumur-sumur tua. Sehingga, masyarakat Desa Wonocolo dan sekitarnya sangat bergantung pada sumur minyak tua tersebut. Tanah sawah yang tidak luas mengakibatkan Masyarakat tidak memiliki pekerjaan sampingan selain menjadi Penambang minyak tradisional. Konflik Desa Wonocolo pada periode 2003-sekarang adalah terkait imbal jasa yang diberikan pihak KUD dan PT BBS yang terlalu murah. Isu utama yang muncul memang karena imbal jasa yang dinilai terlalu murah bagi masyarakat karena tidak dapat menutup biaya operasional penambangan, bahkan malah merugi.

Dalam penelitian ini seluruh kegiatan yang dilakukan oleh pelaku penambang di Wonocolo merupakan bentuk Sengaja Sebagai Sadar Kemungkinan. Sebenarnya pelaku sudah mengetahui bahwa kegiatan yang mereka lakukan dilarang oleh Undang-Undang, akan tetapi adanya beberapa faktor dilakukan karena desakan ekonomi, kondisi geografis yang tidak mendukung untuk pekerjaan lain, dan murahness harga minyak jika dijual ke pihak KUD dan PT BBS.

4. Unsur Pertanggungjawaban Pidana Mampu bertanggung jawab (tidak ada alasan pemaaf dan tidak ada alasan pbenar)

Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan psycis pembuat. Kemampuan bertanggungjawab ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggungjawaban menjdai salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar untuk menentukan pembedaan kepada pembuat. Kemampuan bertanggung jawab ini harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidka dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana. Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa kebanyakan Undnag-Undang merumuskan syarat kesalahan secara negative. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur tentang kemampuan bertanggung jawab namun yang diatur dalam KUHP sendiri justru kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab.⁷⁰

⁷⁰ Andi Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, cetakan ke-2, Jakarta, Sinar Grafika, hlm-260

Bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat si pembuat mampu bertanggung jawab, adanya unsur kesengajaan atau kealpaan sebagai hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatan tercela yang dilakukan, dan tiadanya alasan pemaaf pada si pembuat tindak pidana itu. Berdasarkan teori ini para penambang di Wonocolo sudah memenuhi syarat untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan kriminalnya adalah orang yang berkemampuan bertanggung jawab. Kriteria orang yang berkemampuan bertanggung jawab adalah:

- a. Orang itu mampu mengetahui atau menyadari perbuatannya itu bertentangan dengan hukum.
- b. Orang itu dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran yang dimilikinya

Pasal yang mengatur tentang kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab adalah pasal 44 KUHP yang berbunyi ;

1. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana
2. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Dalam pasal 44 ini seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah ia lakukan apabila tidak memiliki unsur kemampuan bertanggung jawab, ketidak mampuan untuk bertanggung jawab apabila didalam diri pelaku terdapat kesalahan, kesalahan tersebut ada 2 yaitu ;

1. Dalam masa pertumbuhan pelaku, pelaku mengalami cacat mental, sehingga hal itu mempengaruhi pelaku untuk membedakan anatara perbuatan yang baik dan buruk.
2. Jika jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan suatu penyakit, sehingga akalanya kurang berfungsi

secara optimal atau akalnya tidak berfungsi secara optimal untuk membedakan hal-hal yang baik dan buruk. Kemampuan bertanggung jawab juga berhubungan dengan umur tertentu bagi pelaku tindak pidana. Artinya hanya pelaku yang memenuhi batas umur tertentu yang memiliki kemampuan bertanggung jawab serta memiliki kewajiban pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, hal ini dikarenakan karena pada umur tertentu secara *psycologi* dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Pada dasar nya anak pada umur tertentu belum dapat menyadari dengan baik apa yang telah dilakukan, artinya anak pada umur tertentu juga tidak dapat memisahkan mana yang baik dan mana yang salah tentu juga hal ini mempengaruhi anak tidak dapat menginsafkan perbuatannya. Apabila anak pada tertentu melakukan tindak pidana dan oleh karena perbuatannya dilakukan proses pidana maka secara *psycologi* anak tersebut akan terganggu dimasa dewasanya.⁷¹

Dalam proses pembedaan nya hakim wajib mencari dan membuktikan apakah pelaku memiliki unsur kemampuan bertanggung jawab, sebab apabila pelaku tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab baik karena usia yang belum cukup umur, atau dikarenakan keadaan *psycologi* seseorang terganggu maka orang tersebut tidak dapat diminta pertanggung jawabannya.

a). Tidak ada alasan pemaaf

Dalam keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak di inginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku nya harus menghadi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak di inginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena factor-faktor dari luar dirinya.

⁷¹ Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm



Sedangkan alasan pemaaf adalah alasan yang meniadakan unsur kesalahan dalam diri pelaku. Pada umumnya, pakar hukum mengkategorikan suatu hal sebagai alasan pemaaf, yaitu:[3]

- a. ketidakmampuan bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP);
- b. daya paksa (Pasal 48 KUHP);
- c. pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 49 Ayat (2) KUHP); dan
- d. menjalankan perintah jabatan tanpa wewenang (Pasal 51 Ayat (2) KUHP)

Sebagai kesimpulan, alasan pemaaf berarti alasan yang menghapuskan kesalahan dari pelaku tindak pidana. Sementara itu, alasan pembenar berarti alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum dari suatu tindak pidana. Selain itu, alasan pemaaf bersifat subjektif dan melekat pada diri orangnya, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat. Sedangkan alasan pembenar bersifat obyektif dan melekat pada perbuatannya atau hal-hal lain di luar batin si pelaku.

Factor-faktor dari luar dirinya atau batinnya itulah yang menyebabkan pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain yang mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus. Artinya, berkaitan dengan hal ini pembuat tindak pidana terdapat alasan penghapusan pidana, sehingga pertanggungjawaban berkaitan dengan hal ini ditunggukan sampai dapat dipastikan ada tidaknya unsur alasan pemaaf dalam diri pelaku pembuat tindak pidana tersebut. Dalam hal ini sekalipun pelaku pembuat tindak pidana dapat dicela namun celaan tersebut tidak dapat dilanjutkan kepadanya karena pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain selain melakukan tindak pidana tersebut.

- b). Tidak ada alasan pembenar

Dalam doktrin hukum pidana alasan pemaaf dan alasan pembenar, alasan pembenar adalah suatu alasan yang menghapus



sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Alasan pembeda dan alasan pemaaf ini dibedakan karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Adanya perbedaan ini karena alasan pembeda adalah suatu alasan "pembeda" atas suatu tindak pidana yang melawan hukum sedangkan alasan pemaaf berujung pada "pemaafan" terhadap seseorang sekalipun telah melakukan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang telah diperbuat.⁷²

Dalam hukum pidana yang termasuk alasan pembeda seperti keadaan darurat, pembelaan terpaksa, Menjalankan peraturan perundang-undangan, menjalankan perintah jabatan yang sah. Keadaan darurat merupakan salah satu alasan pembeda, yaitu suatu alasan karena seseorang menghadapi dilema situasi untuk memilih suatu tindakan. Keadaan darurat ini sebagai salah satu bentuk *via compulsive* terjadi dalam tiga kemungkinan. Kemungkinan *Pertama* terjepit dimana seseorang memilih diantara dua kepentingan yang sama-sama⁷³ Kemungkinan yang ketiga adalah seseorang ditempatkan pada situasi terjepit diantara dua kewajiban. Pembelaan Terpaksa berada dalam pasal 49 ayat 1 KUHP ditentukan syarat-syarat dimana melakukan suatu delik untuk membela diri dapat dibenarkan. Untuk itu undang-undang menentukan syarat-syarat yang sangat ketat, menurut pasal 49 ayat 1 KUHP untuk pembelaan terpaksa disyaratkan adanya serangan mendadak atau seketika itu terhadap raga, kehormatan, kesusilaan atau harta benda, serangan itu bersifat melawan hukum, dalam hal ini pembelaan adalah suatu keharusan. Pembelaan terpaksa ini dimaksudkan adalah pembelaan yang dilakukan ketika ada suatu serangan yang akan terjadi. Pembelaan terpaksa ini terjadi apabila seseorang tidak melakukan pembelaan diri maka suatu hal yang buruk akan terjadi atau apabila tidak melakukan pembelaan maka menepatkan seseorang dalam keadaan yang merugikan dan membahayakan.

Menjalankan Peraturan Perundang-undangan, hal ini terjadi apabila seseorang dihadapkan dalam dua kewajiban, dalam hal ini seseorang harus melakukan suatu perbuatan sesuai keadaan yang terjadi dan tidak mengabaikan Undang-Undang. contohnya apabila

⁷² Chairul Huda, *Op.Cit*, hlm-116

⁷³ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm-45

ada seseorang yang melanggar lalu lintas maka petugas kepolisian diperbolehkan menghentikan pelaku pelanggar lalu lintas tersebut namun dilarang untuk menembak orang tersebut, jika keadaannya berubah seseorang yang melanggar lalu lintas tersebut adalah tersangka utama yang ada dalam pengejaran kepolisian maka petugas diperbolehkan menembak seseorang tersebut.

Menjalankan Perintah Jabatan Yang Sah. Suatu perintah jabatan mengandaikan suatu hubungan hukum public antara yang memerintah dan yang diperintah. Hal ini artinya seseorang dalam menjalankan perintah jabatan tidak dapat dihukum, karena seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan dengan perintah dan sarana yang patut.

Dalam hukum pidana yang dimaksud dengan alasan pemaaf adalah hukum pidana adalah tidak mampu bertanggungjawab, daya paksa, pembelaan terpaksa melampaui batas.⁷⁴ mengenai ketidakmampuan bertanggung jawab telah dijabarkan sebelumnya, hal ini berkaitan dengan keadaan seseorang dapat atau tidak diri seorang pelaku tersebut melakukan pertanggungjawaban mengenai suatu hal yang telah diperbuat. Daya paksa, dalam KUHP daya paksa diatur didalam pasal 48 yang menyatakan "barang siapa seseorang yang melakukan suatu tindak pidana karena atas dorongan daya paksa, maka tidak dapat dipidana". Pada kata dorongan hal itu mengisyaratkan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut dalam keadaan paksaan secara psikologis. Tekanan psikologi tersebut dapat ada karena tindakan sekita seseorang atau tekanan atau dorongan tersebut memang telah lama ada dan dalam suatu waktu tekanan tersebut meledak.

⁷⁵ Pembelaan terpaksa melampaui batas, apabila pembelaan terpaksa merupakan salah satu alasan pembenar maka dalam pembelaan terpaksa melampaui batas masuk dalam alasan pemaaf, hal ini karena pembelaan terpaksa melampaui batas dapat dicela namun tidak dapat dipidana. Diberi contoh seseorang yang sedang memasak di dapur dihadapkan maling dirumahnya yang memegang pisau maka untuk membela dirinya orang tersebut menusuk maling

⁷⁴ Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, *Op., Cit*, hlm- 59

⁷⁵ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm-47

tersebut dengan pisau hingga meninggal. Berkaitan dengan hal ini hakim harus menggali apakah seseorang tersebut tidak pidana karena suatu alasan pemaaf atau karena alasan pembenar.⁷⁶

5. Unsur Pertanggungjawaban Pidana Bersifat melawan hukum (sesuai dengan azas legalitas)

Perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum. Dulu, pengertian melanggar hukum ditafsirkan sempit, yakni hanya hukum tertulis saja, yaitu undang-undang. Jadi seseorang atau badan hukum hanya bisa digugat kalau dia melanggar hukum tertulis (undang-undang) saja. Tapi sejak tahun 1919, ada putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest Cohen-Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919), yang kemudian telah memperluas pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang (hukum tertulis saja) tapi juga hukum yang tidak tertulis, sebagai berikut :

1. Melanggar Undang-Undang, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang.
2. Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya).
3. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik.
4. Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerdara)
5. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Sifat melawan hukum adalah salah satu unsur tindak pidana, termasuk tindak pidana pertambangan illegal di Wonocolo yang diatur dalam Pasal Mengenai Tindak Pidana Eksploitasi tercantum dalam Pasal 52, Tindak Pidana Pengolahan Minyak dan Gas Bumi Tanpa Surat Izin Usaha tercantum dalam Pasal 53 huruf a, Tindak Pidana Pengangkutan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi Tanpa Izin Usaha tercantum pada

⁷⁶ Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, *Op.Cit*, hlm-69

Pasal 53 huruf b, Tindak Pidana Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi Tanpa Izin Usaha tercantum dalam Pasal 53 huruf c, Tindak Pidana Niaga Tanpa Surat Izin tercantum dalam Pasal 53 huruf d, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Perbuatan yang bersifat melawan hukum (formil), yaitu perbuatan itu masuk dalam rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang (KUHP),

a). Eksplorasi dan Eksploitasi

Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi UNDANG di Wilayah Kerja yang ditentukan; Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.

Termuat dalam Pasal 52 a UU No. 22 tahun 2001, bunyi dan unsur-unsurnya sebagai berikut:

"Setiap orang yang melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa mempunyai Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)."

Unsur Pelaku Tindak Pidana dalam Pasal tersebut :

1. Setiap orang
2. melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi
3. tanpa mempunyai Kontrak Kerja Sama

Cara-cara ilegal inilah yang dianggap peneliti dapat dikategorikan sebagai pertambangan tanpa izin/*illegal mining*. Dalam proses pertambangan tanpa izin/*illegal mining* kerap terjadi *Illegal drilling* merupakan salah satu kejahatan *illegal mining* yang sering terjadi untuk memperoleh minyak bumi dengan cara mengambil dari perut bumi. Karena berdasarkan hasil kesepakatan antara pihak terkait dan penambang, hanya sumur tua

peninggalan belanda yang memiliki legalitas untuk dilakukan penambangan. Akan tetapi semua berbalik dengan apa yang ada di lapangan dimana para penambang banyak melakukan penggalian sumur baru.

b). Pengolahan

Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan.

Berdasarkan Pasal 53 huruf a UU No. 22 tahun 2001, bunyi dan unsur-unsurnya sebagai berikut:

“a. Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi.”

Unsur-Unsur :

1. Setiap orang;
2. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan;
3. Pengolahan Minyak Bumi
4. Tanpa Izin Usaha Pengolahan Minyak Bumi;

c). Pengangkutan

Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.

Kegiatan tersebut secara tegas diancam dalam Pasal 53 huruf b UU No. 22 tahun 2001, bunyi dan unsur-unsurnya sebagai berikut:

“b. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);”

Unsur-Unsur :

1. Setiap orang;

2. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan;

3. Pengangkutan Minyak Bumi;

4. Tanpa Izin Usaha Pengangkutan Minyak Bumi;

Sudah amat jelas bahwa kegiatan tersebut merupakan hal yang tidak dibenarkan oleh Undang-Undang dan unsur-unsur pada Pasal 53 huruf b UU No. 22 tahun 2001 telah terpenuhi secara pendekatan Normative.

d). Penyimpanan

Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi; Pasal 53 huruf c UU No. 22 tahun 2001, bunyi dan unsur-unsurnya sebagai berikut:

"c. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah); "

Unsur-unsur :

1. Setiap orang;

2. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan;

3. Penyimpanan Minyak Bumi;

4. Tanpa Izin Usaha Penyimpanan Minyak Bumi;

e). Niaga

Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.

Pasal 53 huruf d UU No. 22 tahun 2001, bunyi dan unsur-unsurnya sebagai berikut:

"d. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun

dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).”

Unsur-unsur :

1. Setiap orang;
2. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan;
3. Penyimpanan Minyak Bumi;
4. Tanpa Izin Usaha Penyimpanan Minyak Bumi;



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

1). Faktor Penyebab

a. Hubungan antara penambang dan dengan KUD dan PT BBS yang kurang harmonis. Hal ini terlihat dari usaha penambang untuk membentuk KUD lain, yaitu KUD Patra Jasa Jaya. Tetapi KUD ini belum bisa beroperasi karena belum mendapat izin dari Pemerintah sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas.

b. Transaksi minyak mentah hasil sulungan ke luar daerah sangat menguntungkan penambang dan penyuling, tetapi merugikan pemerintah (Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan PT. Pertamina EP Cepu). Penambangan dan penyulingan minyak mentah di Desa Wonocolo yang dilakukan oleh masyarakat menimbulkan sengketa antara masyarakat (dalam hal ini adalah penambang, penyuling, pengecer dan pengepul) dengan PT. Pertamina EP. Cepu. Ditinjau dari sisi hukum kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat adalah melanggar peraturan perundangan yang berlaku yang menyebabkan kerugian pada negara, dalam hal ini adalah PT. Pertamina EP Cepu dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

2). Pertanggungjawaban Pidana

Secara garis besar Pertanggungjawaban Pidana di Wonocolo termasuk dalam *Liability* Dimana Pertanggungjawaban pidana tersebut menitikberatkan kepada diteruskannya celan objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat undang-undang untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya. Hal tersebut sama halnya menganut salah satu asas umum dala Hukum Pidana yaitu asas "tiada pidana tanpa kesalahan", Di mana pikiran-pikiran untuk memisahkan tindak pidana dari pertanggungjawaban pidana dan kesalahan merupakan dasar untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. dapat diketahui bahwa pelaku dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Ada pelaku tindak pidana (baik orang maupun badan hukum).

2. Ada perbuatan (baik aktif maupun pasif).

3. Ada kesalahan (baik sengaja maupun culpa).

4. Mampu bertanggung jawab (tidak ada alasan pemaaf dan tidak ada alasan pembeda).

5. Bersifat melawan hukum (sesuai dengan azas legalitas).

Dalam kenyataannya, di Wonocolo memang telah terpenuhi semua unsur pertanggungjawab pidana, namun tidaklah mudah untuk memastikan siapakah si pembuatnya karena untuk menentukan siapa yang bersalah harus sesuai dengan proses yang ada yaitu sistem peradilan pidana. Dengan demikian tanggung jawab tersebut selalu ada, meskipun belum pernah dituntut oleh pihak yang berkepentingan, jika pelaksanaan peranan yang telah berjalan itu ternyata tidak mencapai tujuan atau persyaratan yang diinginkan. Demikian pula halnya dengan masalah terjadinya perbuatan pidana atau delik, suatu tindakan yang telah melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidaknya oleh undang-undang yang telah dinyatakan sebagai perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum. Suatu perbuatan yang melawan hukum belumlah cukup untuk menjatuhkan hukuman di samping kelakuan melawan hukum harus ada seorang pembuat (dader) yang bertanggung jawab atas perbuatannya.

2. Saran

1. Bagi Penegak Hukum

Pihak pemerintah, dalam hal ini PT. Pertamina EP. Cepu dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, melakukan sosialisasi peraturan perundangan yang terkait dengan kegiatan penambangan. Sosialisasi dilakukan secara formal maupun informal melalui orang-orang yang disegani oleh masyarakat. Agar tidak menyimpang dari UUD 1945, pengelolaan oleh masyarakat harus diadopsi oleh institusi yang merepresentasikan kedaulatan Negara atas penambangan sumur minyak di Desa Wonocolo, dengan alternatif cara:

a. Mengoptimalkan kembali peran KUD dan BUMD sesuai peraturan yang berlaku (Peraturan Menteri ESDM No. 01 Tahun 2008 Pasal 2 ayat 3).

b. Menegakkan hukum khususnya untuk mengatasi penyulingan ilegal, angkutan minyak mentah ke luar desa, dan penjualan minyak mentah kepada pengecer maupun pengepul.

c. penyelesaian di luar pengadilan melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli melalui musyawarah untuk mendapatkan kompensasi biaya

ongkos angkat dan angkut yang dapat diterima dan menguntungkan kedua belah pihak.

d. Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri ESDM No. 01 Tahun 2008, perlu dilakukan persuasi dan negosiasi mengenai ongkos angkat dan angkut hasil produksi minyak mentah agar mereka bersedia menyetorkan kepada KUD BogoSasono, dengan menyadari bahwa sumberdaya alam harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat sesuai amanat Pasal 33 ayat 2 UUD 1945; bukan untuk kepentingan sekelompok masyarakat.

2) Bagi Masyarakat

a. Memupuk kesadaran Masyarakat khususnya masyarakat Desa Wonocolo, bahwa mereka harus tunduk pada peraturan yang berkaitan dengan eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pengangkutan dan penjualan minyak bumi.

b. menyerahkan Kegiatan usaha hulu dan hilir harus dilakukan oleh institusi yang berhak mengelolanya sesuai dengan Pasal 9 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001. Karena itu masyarakat harus dihimpun agar bersedia menjalankan kegiatan pengelolaan minyak sumur tua melalui salah satu institusi yang telah ditetapkan undang-undang ini.



DAFTAR PUSTAKA

a. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kualitas Air

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2008 tentang

Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 52

Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya

Mineral Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor:

239 K/12/MEM/2020 Tentang Penetapan Harga Minyak Mentah Indonesia

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sumur

Tua.

b. Buku, Jurnal, dan Penelitian

Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra ,Bandung.

Abrar Saleng, 2004, Hukum Pertambangan, UII Press, Yogyakarta.

Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*,

Prenadamedia Group, Jakarta.

Anang Priyanto, 2012, "Kriminologi", Penerbit Ombak, Yogyakarta.

Andi Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, cetakan ke-2, Jakarta, Sinar Grafika.

Chairul Huda, 2006, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana.

Indah Sri Utami, 2012, "Aliran dan Teori Dalam Kriminologi", Thafa Media, Bantul Yogyakarta, hlm 72-73

Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, hlm-68

Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum", Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No.1 (2014).

Frans Maramis, 2012, *Hukum PIDana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.

Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015.

Hanan Nugroho, " *Pandemi Covid-19: Tinjau Ulang Kebijakan Mengenai PETI (Pertambangan Tanpa Izin) di Indonesia*" The Indonesian Journal of Development Planning Volume IV No. 2 – Juni 2020,

Moeljalento, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi revisi*, Jakarta, Renika Cipta.

Moeljatno. 1985. *Azaz-azaz Hukum Pidana*. Jakarta:Bina Aksara. Hlm 63

Nandang Sudrajat. *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta. 2013.

Pengantar Ilmu Hukum, Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*.

Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, 1995, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta.

Sukandarrumidi, bahan-bahan galian industri. (Yogyakarta: gadjah mada, University press,tt).

Sulaiman, "Rekontruksi Hukum Minyak dan Gas Bumi yang Berkeadilan di Indonesia", Jurnal Hukum Vol. 18, No. 2, 2016.

Tongat. 2012. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*.

c. Internet

"5 Pengertian Minyak Bumi Menurut Para Ahli", <http://www.indonesiastudents.com/pengertian-minyak-bumi-menurut-para-ahli/>, (diakses pada tanggal 19 Oktober 2020, pukul 20.22).

Eduspensa, "Teori Pembentukan Migas", <https://www.dinarenergy.com/2015/02/macam-macam-bahan-bakar-minyak-bbm.html>, (diakses pada tanggal 12 Oktober 2020, pukul 00.26).

<http://travel.kompas/read/2015/01/04/170300427.html>

Made Pertiwi. "Tambang Minyak Tadisional Wonocolo." Kompas Travel, Januari 4, 2015, diakses pada 10 Oktober 2020,

Migasnet, "Teori Minyak Bumi", <http://migasnet11rizki8002.blogspot.sg/2010/01/teori-pembentukan-minyak-bumi.html>, (diakses pada tanggal 19 Oktober 2020, pukul 23.42).

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia: Pertambangan Mineral dan Batubara*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2010), hal. 162

LAMPIRAN 1

SURAT PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
BRAWIJAYA NOMOR 812 TAHUN 2021**

**TENTANG
PERPANJANGAN PERTAMA PENETAPAN PEMBIMBING
SKRIPSI PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM ATAS
NAMA M. AINUN BAHRONI**

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Menimbang : a. bahwa penulisan skripsi merupakan syarat yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum;
b. bahwa mahasiswa atas nama M. Ainun Bahroni NIM 175010100111143 belum menyelesaikan skripsi sesuai jangka waktu yang telah ditentukan;
c. bahwa demi kelancaran penulisan skripsi diperlukan perpanjangan dosen pembimbing;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan perpanjangan Keputusan Dekan tentang Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
5. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 304 Tahun 2019 tanggal 4 Februari 2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PERPANJANGAN PERTAMA
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI PROGRAM STUDI**

SARJANA ILMU HUKUM ATAS NAMA M. AINUN BAHRONI.

KESATU : Memperpanjang Penugasan Kepada Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.H. dan Dr. Yuliati, S.H., LL.M. sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping dalam Penulisan Skripsi Mahasiswa Program Sarjana Ilmu Hukum atas nama M. Ainun Bahroni NIM 175010100111143;

KEDUA : Keputusan Dekan ini berlaku 3 bulan sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Malang pada tanggal
04 Mei 2021



DEKAN FAKULTAS HUKUM,
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Muchamad Ali Safa'at

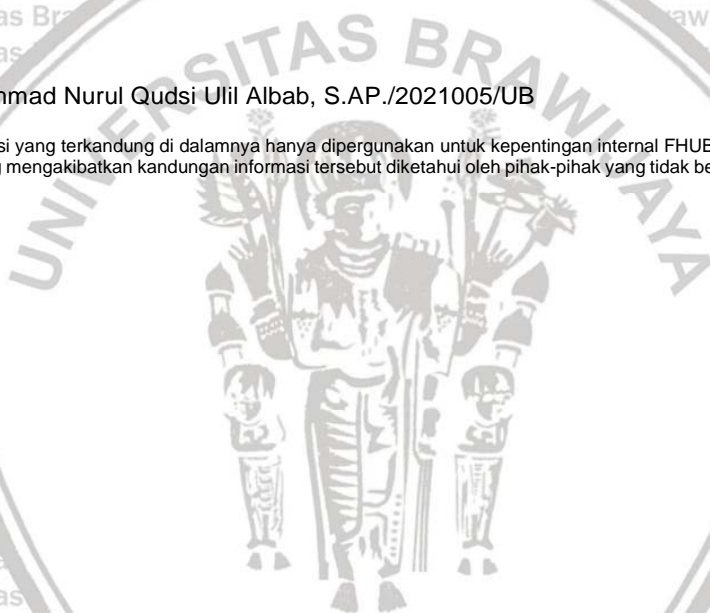
NIP 197608151999031003

Tembusan

1. Sdr. Ketua Departemen Hukum Pidana
2. Sdr. Subkoordinator Subbagian Keuangan dan Kepegawaian
3. Sdr. Muhammad Nurul Qudsi Ulil Albab, S.AP.
4. Sdr. Sucipto, S.E.

Printed by : Muhammad Nurul Qudsi Ulil Albab, S.AP./2021005/UB

Dokumen ini dan informasi yang terkandung di dalamnya hanya dipergunakan untuk kepentingan internal FHUB. Setiap perbuatan atau tindakan, apapun cara dan bentuknya, yang mengakibatkan kandungan informasi tersebut diketahui oleh pihak-pihak yang tidak berhak dapat dikenai sanksi disiplin dan/atau sanksi hukum.



LAMPIRAN 2

SURAT IZIN SURVEY PENELITIAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia

Telp. +62-341-553898; Fax . +62-341-566505

<http://www.hukum.ub.ac.id>

E-mail : hukum@ub.ac.id

Nomor : 3428/UN10.F01.01/PP/2021

08 April 2021

Lampiran : -

Hal : SURAT IZIN SURVEY SKRIPSI
AN. M. AINUN

Yth. Kepala Desa Wonocolo, Kepala Museum Wonocolo

Sehubungan dengan program penyusunan skripsi/tugas akhir yang merupakan syarat wajib dipenuhi oleh setiap mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya untuk memperoleh gelar kesarjanaan, maka dengan ini kami mohon dengan hormat bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu dapat mengizinkan mahasiswa kami :

Nama : M. Ainun Bahroni

NIM : 175010100111143

Alamat : Perumahan Pesona Bukirsari No. E1, Loqwokwaru, Kota

Malang Telp : 082335914891

Konsentrasi : Kependanaan

Untuk melakukan survey skripsi dan mendapatkan data/informasi berkaitan dengan judul :

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PERTAMBANGAN TANPA IZIN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN**

GAS BUMI (Studi Kasus di Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro)

Tempat : Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten

Bojonegoro Waktu : 10 April 2021 sampai 24 April 2021

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Tembusan:



Printed by : Riva Nuariska, S.E./2012058512312001/UB

Dokumen ini dan informasi yang terkandung di dalamnya hanya dipergunakan untuk kepentingan internal FHUB.
Setiap perbuatan atau tindakan, apapun cara dan bentuknya, yang mengakibatkan kandungan informasi tersebut diketahui oleh pihak-pihak yang tidak berhak dapat dikenai sanksi indisipliner dan/atau sanksi hukum.



LAMPIRAN 3

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : JASMIN

JABATAN : KEPALA DESA

INSTANSI : PEMERINTAH DESA WONOCOLO

ALAMAT : DESA WONOCOLO, KEC. KEDEWAN, KAB. BOJONEGORO

Menerangkan Bahwa :

Nama : M. AINUN BAHRONI

Nim : 175010100111143

Jurusan : ILMU HUKUM

Konsentrasi : HUKUM PIDANA

Keterangan : Bahwa Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan Penelitian dengan
Sungguh-sungguh di Desa Wonocolo, Kec. Kedewan, Bojonegoro

Dengan Judul : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PERTAMBANGAN
TANPA IZIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK
DAN GAS BUMI (studi kasus Desa Wonocolo)

Demikian Surat Ini kami buat dengan Sebenar-benarnya, agar dapat dibuat dengan
sebagaimana mestinya.

Bojonegoro, 07 Mei 2021



LAMPIRAN 4

PEDOMAN WAWANCARA

1. Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pertambangan Ilegal di Wonocolo.

- a) Apa factor penyebab pertambangan illegal di Wonocolo
- b) Kenapa konflik yang terjadi di wonocolo belum terselesaikan.
- c) Apakah KUD dan BUMD PT BBS pernah melakukan penyuluhan secara langsung.
- d) Bagaimana sejarah konflik pertambangan illegal di Wonocolo.
- e) Bagaimana pemenuhan hak para penambang yang terdaftar di KUD dan PT BBS.
- f) Mengapa harga di KUD dan PT BBs lebih murah.
- g) Mengapa minyak mentah diolah menjadi minyak siap digunakan.
- h) Darimana para penambang dapat mengetahui cara melakukan pengolahan minyak mentah menjadi minyak siap pakai.
- i) Apa yang menjadi alasan utama para penambang menjual hasil tambang ke pihak luar.
- j) Bagaimana kondisi geografi dan ekonomi masyarakat wonocolo secara umum
- k) Apa efek yang terjadi jika masyarakat tidak melakukan penambangan.
- l) Apakah pernah ada konsolidasi terbuka antara pihak terkait untuk menyelesaikan konflik di Wonocolo.

2. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Ilegal di Wonocolo

- a) Apakah para penambang mengetahui kegiatan yang mereka lakukan melanggar hukum.
- b) Apakah pernah ada tindakan tegas dari para penegak hukum untuk menertibkan para penambang illegal di Wonocolo.

- c) Apakah para penambang mengetahui tentang AMDAL.
- d) Apakah para penambang mengetahui tentang tatacara perizinan pertambangan.
- e) Bagaimana bisa ada para pemodal dari luar di Wonocolo.
- f) Apakah para penambang mengetahui tentang pertanggungjawaban pidana.
- g) Dimana para penambang melakukan kegiatan perniagaan?
- h) Dimana para penambang menjual hasil dari pengolahan?
- i) Apakah para penambang mengetahui jika kegiatan illegal yang mereka lakukan tidak hanya sekedar proses penambangan, melainkan juga mencakup pada proses pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan peniagaan
- j) Apakah ada putusan yang kongkrit dari pengadilan mengenai petambangan di Wonocolo.



LAMPIRAN 5

HASIL OLAH DATA KUSIONER

Keterangan :

1. SM : Sangat Mengetahui

2. CM : Cukup Mengetahui

3. TM : Tidak Mengetahui

No	Pernyataan	SM	M	TM
1	Pertambangan di Wonocolo	80%	20%	0%
2	Sejarah konflik pertambangan ilegal di Wonocolo	34%	27%	39%
3	konflik yang terjadi di wonocolo belum terselesaikan	57%	35%	8%
4	KUD dan PT BBS adalah rekan Pertamina yang menangani Pertambangan di Wonocolo	73%	27%	0%
5	KUD dan BUMD PT BBS pernah melakukan penyuluhan secara langsung	21%	24%	55%
6	Cara melakukan pengolahan minyak mentah menjadi minyak siap pakai.	43%	57%	0%
7	Para penambang mengetahui kegiatan yang mereka lakukan melanggar hukum	38%	54%	8%
8	Kegiatan para penambang dapat dipidana	18%	72%	10%
9	tindakan tegas dari para penegak hukum untuk menertibkan para penambang ilegal di Wonocolo	37%	42%	21%

10	Kegiatan ilegal penambang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana	16%	78%	6%
11	Pertambangan ilegal di Wonocolo dilakukan dengan sengaja	67%	29%	4%
12	Tatacara perizinan pertambangan.	5%	43%	52%
13	Kegiatan ilegal penambang meliputi proses pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan peniagaan	28%	61%	11%
14	Adanya Oknum yang menjadi backingan bagi para penambang	36%	43%	21%
15	Harga minyak di Wonocolo mengikuti harga minyak dunia	11%	25%	64%
16	Minyak hasil penyulingan solar memiliki harga yang lebih mahal	76%	24%	2%
TOTAL HASIL KESELURUHAN		40%	35,57	24,43%

